



**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KASUS KALIJODO
DI LAMAN KOMPAS**

SKRIPSI

Oleh

**Tiara Nurmarinda
NIM 120210402090**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KASUS KALIJODO
DI LAMAN KOMPAS**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Tiara Nurmarinda
NIM 120210402090**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra INDONESIA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

HALAMAN PENGAJUAN

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KASUS KALIJODO
DI LAMAN KOMPAS**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Nama Mahasiswi : Tiara Nurmarinda
NIM : 120210402090
Angkatan Tahun : 2012
Daerah Asal : Jember
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 31 Juli 1994
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Arju Mutiah, M.Pd.
NIP. 196003121986012001

Anita Widjajanti, S.S, M.Hum.
NIP. 19710402 2005012002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas berkah dan hidayah Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1) kedua orang tua, Bapak Drs. Ahmad Nurhadi dan Ibu Emi Ratnawati, S.Pd., yang selalu mencurahkan kasih sayang dan tak henti-hentinya mendoakan ananda;
- 2) keluarga besar yang selalu mencurahkan kasih sayang dan dukungan;
- 3) guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi yang telah mendidik dan membagi ilmu dan pengalaman kepada ananda;
- 4) keluarga besar UKM Paduan Suara Universitas Jember, Paranada; dan
- 5) almamater yang kebanggakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

MOTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan-kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

(Winston Churchill)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Tiara Nurmarinda

NIM : 120210402090

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Februari 2017

Yang menyatakan,

Tiara Nurmarinda

NIM 120210402090

HALAMAN PEMBIMBINGAN

**ANALISIS WACANA KRITIS PEMBERITAAN KASUS KALIJODO
DI LAMAN KOMPAS**

SKRIPSI

Oleh

Tiara Nurmarinda

NIM 120210402090

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Arju Mutiah, M.Pd.

Dosen Pembimbing Anggota : Anita Widjajanti, S.S, M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Analisis Wacana Kritis Pemberiaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Senin, 27 Februari 2017

pukul : 10.30 - 12.00

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Arju Mutiah, M.Pd
NIP 196003121986012001

Anita Widjajanti, S.S, M.Hum.
NIP 197104022005012002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Sukatman, M.Pd
NIP 196401231995121001

Dr. Muji, M.Pd.
NIP 195907161987021002

Mengesahkan,
Dekan FKIP Universitas Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D
NIP. 196808021993031004

RINGKASAN

Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas; Tiara Nurmarinda; 2017: 161 halaman; Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Analisis wacana kritis merupakan suatu kajian wacana yang tidak hanya aspek linguistik, tetapi menelaah makna, konteks sosial dan ideologi yang tersembunyi di dalam teks. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas. Pemberitaan Kalijodo yang berkembang di masyarakat mengenai pro dan kontra kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan lokalisasi Kalijodo. Lokalisasi tersebut dijadikan tempat kriminalitas dan penyakit sosial masyarakat. Selain itu, Kalijodo dianggap sebagai lokasi jalur hijau.

Berdasarkan hal tersebut, kajian dalam penelitian ini terdiri atas tiga rumusan masalah yaitu mengenai (1) bagaimanakah strategi retorik yang berupa pilihan kata pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas, (2) bagaimanakah konteks sosial pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas, dan (3) Bagaimanakah ideologi pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan (1) strategi retorik yang berupa pilihan kata pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas, (2) konteks sosial pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas, dan (3) ideologi pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan rancangan penelitian kualitatif analisis wacana kritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata, frasa atau kalimat yang terdapat pada teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas, dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku referensi atau sumber lain yang berkaitan dengan pemberitaan kasus

Kalijodo. Data-data tersebut diperoleh dari beberapa sumber yaitu (1) pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas, (2) hasil wawancara dengan penduduk yang tinggal di kawasan Jakarta Utara, (3) video tentang sejarah Kalijodo, dan (4) buku-buku terkait pemberitaan kasus Kalijodo. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah (1) dokumentasi, dan (2) wawancara. Prosedur dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan kasus Kalijodo terdapat strategi retorik berupa (1) leksikon perintah mengenai adanya penggunaan kata perintah tertentu dari seseorang yang berkuasa kepada bawahannya, (2) leksikon upaya mengenai penggunaan kata yang dilakukan untuk usaha demi mencapai tujuan tertentu, dan (3) leksikon penekanan mengenai penggunaan kata untuk memaksa dalam melaksanakan tujuan tertentu. Selain itu, dalam pemberitaan kasus Kalijodo terdapat konteks sosial berupa (1) konteks politik, (2) konteks ekonomi, (3) konteks hukum, dan (4) konteks budaya. Dalam konteks sosial juga memuat ideologi yang melatarbelakangi teks kasus Kalijodo, yaitu (1) ideologi Pancasila, dan (2) ideologi politik.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari laporan penelitian ini, disarankan beberapa hal sebagai berikut: (1) bagi mahasiswa dan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, disarankan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai strategi retorik, ideologi Pancasila, ideologi politik, dan fenomena yang berkembang di masyarakat ketika mempelajari dan mengaplikasikan teori analisis wacana kritis pada wacana berita, dan (2) bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis disarankan untuk mengembangkan kajian pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas pada elemen-elemen wacana lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Elemen wacana tersebut terdiri dari strategi semantik, strategi sintaksis, strategi stilistik, dan strategi retorik pada aspek metafora, grafis, dan ekspresi.

PRAKATA

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

- 1) Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- 2) Dr. Arju Mutiah, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Seni sekaligus dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing I;
- 3) Furoidatul Husniah, S.S., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- 4) Anita Widjajanti, S.S, M.Hum. selaku dosen pembimbing II;
- 5) seluruh dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Jember yang tak pernah lelah mendidik kami selama dalam masa studi;
- 6) kedua orangtuaku, Ibu Emi Ratnawati, S.Pd., dan Bapak Drs. Ahmad Nurhadi;
- 7) dan adikku, Faisal Akbar Firmansyah, tersayang;
- 8) teman-teman Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2012 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 30 Januari 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

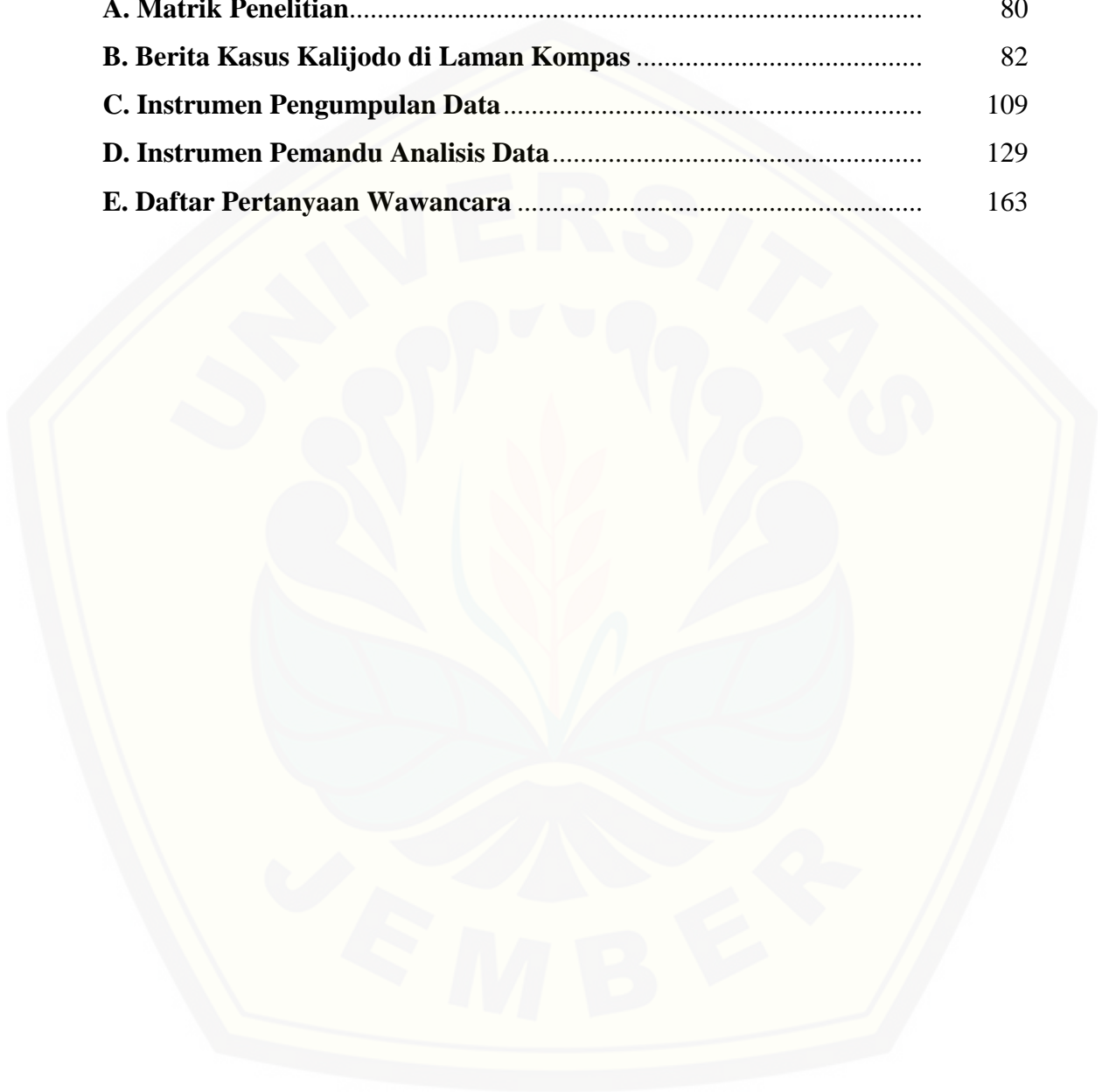
	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Definisi Operasional	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan	8
2.2 Wacana sebagai Produk Kegiatan Berbahasa	9
2.3 Berita sebagai Wacana Informasional	12
2.4 Analisis Wacana Kritis	14
2.5 Kerangka Analisis Wacana Kritis Van Dijk	15
2.5.1 Teks	16

2.5.2 Kognisi Sosial	19
2.5.3 Konteks Sosial.....	25
2.6 Kalijodo dalam Perkembangan Jakarta.....	27
2.6.1 Awal Mula Berdirinya Kalijodo.....	27
2.6.2 Berkembangnya Prostitusi, Preman, dan Judi di Kalijodo	28
2.6.3 Pengembalian Fungsi Ruang Terbuka Hijau.....	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian	32
3.2 Data dan Sumber Data	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
3.5 Instrumen Penelitian	37
3.6 Prosedur Penelitian.....	38
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Strategi Retoris Berupa Pilihan Kata dalam Pemberitaan Kasus Kalijodo.....	40
4.2.1 Leksikon Perintah	40
4.2.2 Leksikon Upaya	44
4.2.3 Leksikon Penekanan	47
4.2 Konteks Sosial dalam Pemberitaan Kasus Kalijodo.....	52
4.2.1 Konteks Sosial Politik.....	52
4.2.2 Konteks Sosial Ekonomi.....	56
4.2.3 Konteks Sosial Hukum	61
4.2.4 Konteks Sosial Budaya	66

4.3 Ideologi dalam Pemberitaan Kasus Kalijodo	69
4.3.1 Ideologi Pancasila	69
4.3.2 Ideologi Politik	73
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
AUTOBIOGRAFI	163

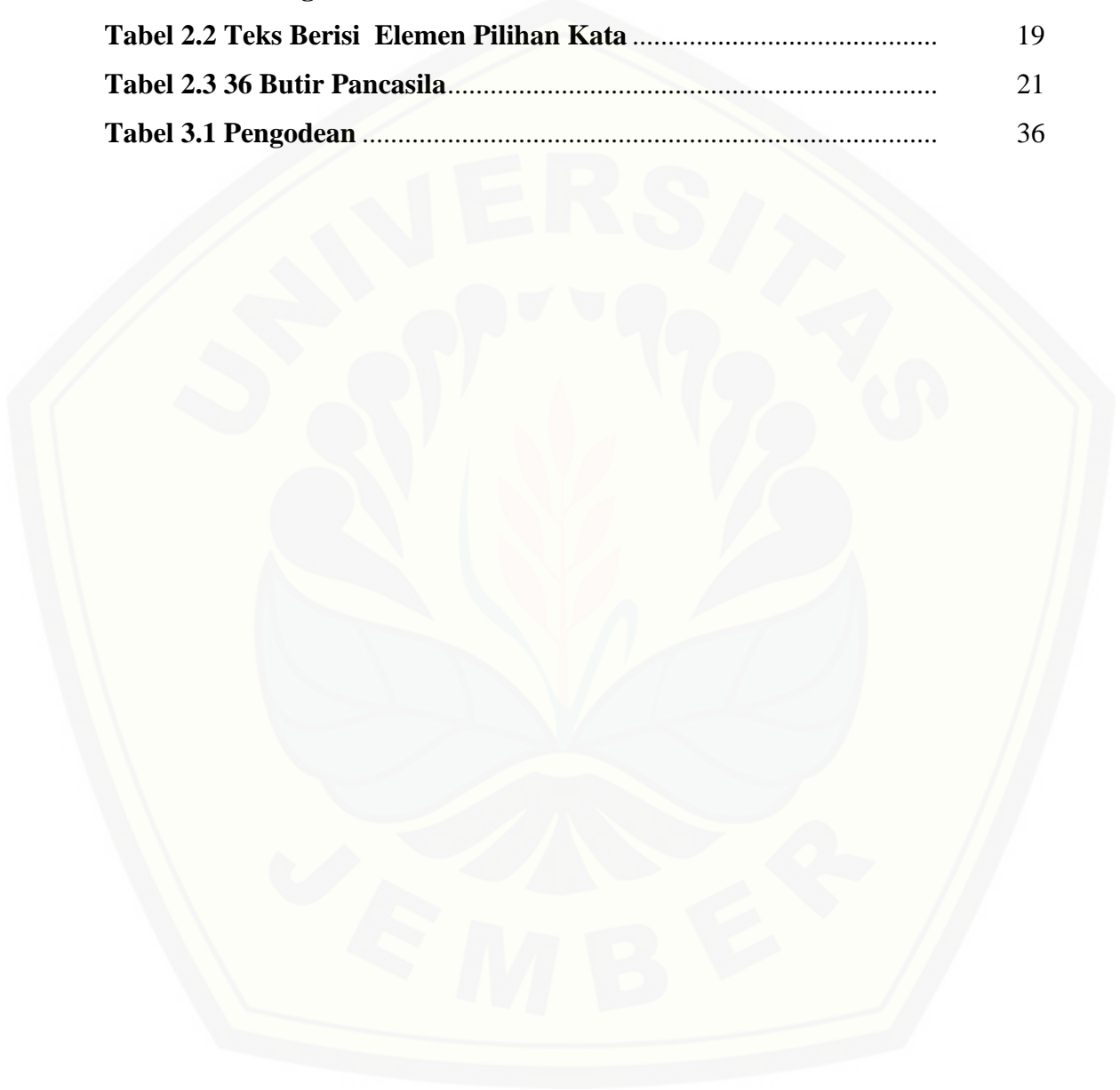
DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Matrik Penelitian.....	80
B. Berita Kasus Kalijodo di Laman Kompas	82
C. Instrumen Pengumpulan Data.....	109
D. Instrumen Pemandu Analisis Data.....	129
E. Daftar Pertanyaan Wawancara	163



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Analisis Dimensi Teks	17
Tabel 2.2 Teks Berisi Elemen Pilihan Kata	19
Tabel 2.3 36 Butir Pancasila.....	21
Tabel 3.1 Pengodean	36



BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini terdapat beberapa hal yang akan dibahas. Hal-hal tersebut meliputi: (1) latar belakang, (2) ruang lingkup dan batasan penelitian, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) manfaat penelitian, dan (6) definisi operasional.

1.1 Latar Belakang

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia. Melalui bahasa seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kurniawan (dalam Darma, 2009:1) yang menyatakan bahwa bahasa dapat menyampaikan beberapa berita, pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan lain-lain. Oleh karena itu, bahasa dijadikan sebagai dasar segala kegiatan yang dilakukan manusia.

Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan dalam berbagai konteks. Konteks merupakan segala sesuatu yang berada di luar bahasa dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Salah satu konteks dalam pemakaian bahasa adalah konteks sosial. Syafi'i (dalam Lubis, 2011:60) menyatakan bahwa konteks sosial merupakan hubungan sosio-kultural antarpelaku dan partisipan.

Wacana terbentuk karena adanya komunikasi dengan dipengaruhi konteks. Wacana adalah komunikasi tulisan yang berisi rentetan kalimat yang berkaitan mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Wacana dipahami sebagai suatu tindakan atau interaksi yang memiliki tujuan, apakah mempengaruhi, membujuk, menyangga, bereaksi dan sebagainya. Melalui wacana yang dibangun dapat dibentuk opini publik untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Salah satu contoh wacana adalah wacana berita.

Wacana berita adalah wacana yang mengomunikasikan informasi terbaru kepada publik. Wacana berita memiliki karakteristik, diantaranya menyampaikan peristiwa yang aktual, dan lengkap serta menggunakan bahasa yang menarik perhatian dan mudah dipahami oleh pembaca. Peristiwa yang aktual merupakan peristiwa yang baru terjadi dan hangat diperbincangkan. Wacana berita yang lengkap memuat 5W+1H (*what, who, where, when, why* dan *how*). Bahasa yang menarik dalam wacana berita menggunakan kalimat aktif, logis, populis, dan sesuai kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sehingga menimbulkan minat untuk membaca. Salah satu contoh berita yang memenuhi karakteristik wacana berita tersebut adalah berita Kalijodo.

Wacana berita Kalijodo merupakan wacana yang berkembang di masyarakat. Wacana tersebut, memuat pro dan kontra kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan lokalisasi Kalijodo. Wacana berita Kalijodo menjadi berita yang menarik karena banyak kalangan baik dari masyarakat Kalijodo, artis, dan pegawai pemerintah yang memberikan opini tentang setuju maupun tidak setuju terhadap penertiban kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau.

Pemberitaan mengenai penertiban lokalisasi Kalijodo disebarluaskan melalui media massa baik media lisan atau tulis. Salah satu media massa terbesar di Indonesia yang memberitakan kasus Kalijodo adalah media Kompas. Kompas merupakan media yang menginformasikan kasus Kalijodo kepada masyarakat tentang pendapat beberapa orang yang memiliki kekuasaan baik menyetujui dan menolak terhadap penertiban kawasan Kalijodo. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas menarik untuk diteliti.

Wacana berita Kalijodo dapat dianalisis menggunakan analisis wacana kritis (AWK). AWK digunakan karena diduga dalam teks berita Kalijodo dilatarbelakangi praktik kekuasaan, politik, prostitusi, dan perjudian ilegal. Paradigma dalam AWK tidak hanya dipusatkan pada teks akan tetapi melalui bagaimana teks itu diproduksi. Proses produksi teks juga dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

AWK memiliki beberapa model analisis yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Teun van Dijk. Hal itu disebabkan model AWK yang dikembangkan van Dijk mengelaborasi semua unsur yang berpengaruh pada proses terbentuknya wacana. Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001:24) mengemukakan bahwa wacana dibentuk oleh tiga dimensi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks, yang diteliti adalah strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kognisi sosial mempelajari produksi teks berita yang melibatkan individu pembuat berita. Konteks sosial mempelajari keadaan yang ada di masyarakat sehingga terbentuk wacana. Salah satu contoh wacana yang dapat dianalisis menggunakan model Van Dijk adalah pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan penertiban kawasan Kalijodo harus dilakukan bulan Februari ini. Pasalnya, pada bulan Maret, Jakarta akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI). "Kami lagi lihat dulu apakah mau sebelum jadi tuan rumah OKI atau sesudah (KTT OKI). Saya inginnya sih sebelum Jakarta jadi tuan rumah, bulan ini (Kalijodo) harus diberesin," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (15/2/2016).

Basuki mengatakan, rencananya hari ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian akan memimpin rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo. Namun, Basuki memastikan tidak akan menghadiri rapat koordinasi tersebut. "Kapolda akan mendengarkan semuanya, dari pihak RT dan RW, karena ini kan kasusnya berbeda. Berbeda dengan kawasan (lokalisasi) Dolly (Surabaya) yang memang itu kampung," kata Basuki. Rencananya, kawasan Kalijodo akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau. Penertiban kawasan Kalijodo akan ditertibkan setelah penerbitan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar (SPB).

Dalam teks berita kasus Kalijodo di atas terdapat kata, kalimat atau proposisi yang menarik karena adanya strategi retorik. Strategi retorik adalah gaya bahasa yang diungkapkan oleh penulis wacana. Strategi retorik pada teks tersebut, dapat dikategorikan menjadi leksikon perintah, leksikon upaya, dan leksikon penekanan. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan leksikon penekanan pada proposisi "Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama **menegaskan** penertiban kawasan

Kalijodo harus dilakukan bulan Februari ini”. Kata menegaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak ragu-ragu.

Strategi retorik yang terdapat pada data di atas juga mengandung konteks sosial tertentu. Konteks sosial tersebut dapat berupa konteks politik, konteks ekonomi, konteks hukum, dan konteks budaya. Konteks politik yang melatarbelakangi munculnya teks di atas adalah adanya penggunaan kekuasaan oleh Basuki yang sifatnya memaksa kepada masyarakat untuk melaksanakan perintahnya. Konteks hukum yang melatarbelakangi data di atas adalah UUD 1945 pasal 2 tentang penggunaan bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dan lingkungan. Selanjutnya, konteks ekonomi melatarbelakangi data di atas adalah keadaan ekonomi masyarakat yang berada ditaraf rendah atau ekonomi kelas bawah .

Ideologi yang ada dalam data di atas muncul karena adanya hubungan antara konteks sosial dan strategi retorik. Ideologi yang menggambarkan data tersebut didasarkan pada ideologi pancasila khususnya sila keempat. Sila keempat memiliki makna keputusan yang diambil harus secara bijaksana, bermusyawarah, dan menguntungkan rakyat. Sebuah keputusan jika diambil secara bijaksana dan musyawarah tidak akan merugikan siapapun. Hal tersebut dikarenakan dalam mengambil sebuah keputusan perlu pemikiran yang matang dan tidak hanya bersumber dari satu sisi saja melainkan sisi yang lain juga perlu diperhatikan. Berdasarkan uraian tersebut, judul penelitian yang dipilih adalah “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kasus Kalijodo di Laman Kompas”.

1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penggambaran wacana oleh Teun van Dijk pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas. Model analisis wacana kritis Teun van Dijk mencakup tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Dimensi teks dibatasi pada strategi wacana. Strategi wacana dibatasi dengan

strategi retorik saja. Pada aspek strategi retorik dibatasi pada elemen pemilihan kata pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas. Pada dimensi kognisi sosial dibatasi pada aspek ideologi karena yang terdapat dalam pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas. Pada dimensi konteks sosial dibatasi pada aspek konteks politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

1.3 Rumusan Masalah

Suatu penelitian pada dasarnya bersumber dari adanya permasalahan. Pembahasan dalam sebuah karya ilmiah memerlukan rumusan masalah agar mempermudah penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagaimanakah strategi retorik yang berupa pilihan kata pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas?
- (2) Bagaimanakah konteks sosial pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas?
- (3) Bagaimanakah ideologi pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Strategi retorik yang berupa pilihan kata pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.
- (2) Konteks sosial pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.
- (3) Ideologi pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Bagi mahasiswa dan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam mata kuliah Analisis Wacana khususnya pada materi Analisis Wacana Kritis.
- (2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis atau penelitian lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas.

1.6 Definisi Operasional

Berikut ini definisi operasional istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan memberikan batasan penafsiran istilah yang terkait dengan judul dan kajian penelitian. Istilah-istilah tersebut adalah:

- (1) Wacana adalah rangkaian kalimat dalam bentuk teks berita kasus Kalijodo yang disusun secara kontinuitas, kohesif, dan koheren sesuai dengan ideologi dan konteks tertentu.
- (2) Berita adalah salah satu laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus disampaikan kepada khalayak.
- (3) Analisis wacana kritis adalah suatu kajian wacana yang tidak hanya aspek linguistik, tetapi juga menelaah makna, konteks sosial dan ideologi yang tersembunyi dalam teks pemberitaan kasus Kalijodo.
- (4) Strategi retorik adalah cara atau metode pemilihan kosakata yang menunjukkan bagaimana sudut pandang, makna, dan maksud penulis mengenai pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

- (5) Konteks sosial adalah keadaan maupun perilaku sosial masyarakat dikawasan Kalijodo yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.
- (6) Ideologi adalah sudut pandang terhadap suatu realitas yang terjadi di masyarakat yang terdapat dibalik pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi: (1) penelitian sebelumnya yang relevan, (2) wacana sebagai produk kegiatan berbahasa; (3) berita sebagai wacana informasional; (4) analisis wacana kritis (5) kerangka analisis wacana kritis Van Dijk (6) Kalijodo dalam perkembangan Jakarta.

2.1 Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Pada dasarnya sebelum penelitian tentang Analisis Wacana Kritis (AWK) pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas dilakukan, terdapat penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan tersebut dilakukan Yuvita Ardi Yuwana (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember 2016). Penelitian yang dilakukan Yuvita Ardi Yuwana tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis van Dijk dengan objek kajian *Jingle* Program Pemerintahan Orde Baru. Fokus kajian dalam penelitian itu adalah seluruh dimensi dan elemen wacana yang dikemukakan van Dijk. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan strategi semantik, strategi retorik, ideologi, konteks sosial pada *Jingle* Program Pemerintahan Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam lirik *jingle* program pemerintahan Orde Baru terdapat strategi semantik yang berupa latar, detail, dan maksud, strategi retorik yang berupa pilihan kata, ideologi yang berupa ideologi Pancasila, dan konteks sosial yang berupa konteks ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan.

Penelitian yang relevan berikutnya dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arti Prihatini (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember 2014) dengan menggunakan model analisis wacana kritis van Dijk dengan objek kajian wayang Durangpo karya Sujiwo Tejo yang terdapat di rubrik senggang di surat kabar Jawa Pos. Fokus kajian dalam penelitian itu adalah

seluruh dimensi dan elemen yang dikemukakan van Dijk. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan topik, skema, strategi semantik, strategi retorik, ideologi, dan konteks sosial pada wayang Durangpo karya Sujiwo Tejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam wayang Durangpo karya Sujiwo Tejo terdapat topik, skema, strategi semantik, strategi retorik, ideologi, dan konteks sosial.

Berdasarkan penjelasan terkait penelitian relevan tersebut, maka terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah suatu objek dikaji dengan menggunakan analisis wacana kritis Teun van Dijk. Perbedaannya adalah objek dalam penelitian ini adalah berita kasus Kalijodo pada laman Kompas. Penelitian Yuvita Ardi yuwana menggunakan objek lirik *Jingle* Program Pemerintahan Orde Baru, sedangkan penelitian Arti Prihatini menggunakan objek wayang Durangpo karya Sujiwo Tejo yang terdapat di rubrik senggang di surat kabar Jawa Pos. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji beberapa elemen wacana menurut van Dijk yang terdiri dari strategi retorik yang berupa pilihan kata, konteks sosial yang berupa konteks politik, ekonomi, hukum, dan budaya, dan ideologi yang berupa ideologi Pancasila dan ideologi politik.

2.2 Wacana sebagai Produk Kegiatan Berbahasa

Wacana adalah unsur kebahasaan yang relatif kompleks dan paling lengkap. Kridalaksana (dalam Sukatman, 2005:118) menegaskan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi, dalam hierarki satuan gramatikal. Hal ini disebabkan wacana sebagai satuan gramatikal dan sekaligus kajian objek linguistik mengandung semua unsur kebahasaan yang diperlukan dalam segala hal bentuk komunikasi. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, didalam wacana terdapat konsep, gagasan, pikiran atau ide utuh yang bisa dipahami tanpa keraguan oleh pembaca atau pendengar.

Sukatman (2005:119) menyatakan, “wacana merupakan tuturan ungkapan, di dalamnya terdapat unsur struktur, fungsi dan konteks”. Tujuan suatu wacana

dipengaruhi target yang ingin dicapai. Target berhubungan erat dengan aspek sosial karena produsen wacana merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki visi dan misi tertentu ketika berkomunikasi.

Wacana merupakan rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun non segmental (Sobur dalam Darma, 2009:3). Subjek yang dibicarakan berkaitan dengan interpretasi tertentu dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasi seperti kata-kata, tulisan, dan sebagainya, eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang berkaitan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatar belakangi keberadaannya, dan lain-lain. Kesemuanya itu dapat berupa nilai-nilai ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian wacana tersebut. Darma (2009:3) menyebutkan ciri-ciri wacana meliputi : (1) wacana dapat berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur, (2) wacana mengungkapkan suatu hal (subjek), (3) penyajian wacana teratur, sistematis, koheren, dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya, (4) memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian pembahasan, (5) dibentuk oleh unsur segmental dan non segmental, dan (6) wacana yang berhubungan dengan situasi, waktu, nada, tekanan, dan sebagainya dalam pemakaian bahasa.

- 1) Wacana dapat berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Hal ini menunjukkan bahwa wacana merupakan rangkaian komunikasi dengan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Wacana yang berupa rangkaian komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis disebut wacana tulis dan wacana yang berupa rangkaian komunikasi dengan menggunakan bahasa lisan disebut wacana lisan.
- 2) Wacana mengungkapkan suatu hal (subjek). Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dikomunikasikan dalam wacana, baik wacana lisan maupun wacana tulis adalah subjek tertentu. Subjek tersebut berupa peristiwa-

peristiwa yang terjadi di masyarakat, misalnya berita politik, budaya, iklan layanan masyarakat dan sebagainya.

- 3) Penyajiannya teratur, sistematis, koheren dan lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Ini menunjukkan bahwa subjek yang dikomunikasikan disampaikan secara teratur, berurutan, saling berkaitan dan memperhatikan konteks tertentu.
- 4) Memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian pembahasan. Ini menunjukkan bahwa wacana yang dikomunikasikan berada dalam satu tujuan yang sama.
- 5) Dibentuk oleh unsur segmental dan non segmental. Unsur segmental adalah unsur yang ada dalam kalimat tertulis, seperti penulisan tanda baca, huruf kapital dan sebagainya. Unsur non segmental adalah unsur dalam wacana yang berhubungan dengan situasi, waktu, nada, tekanan dan sebagainya dalam pemakaian bahasa.
- 6) Wacana yang berhubungan dengan situasi, waktu, nada, tekanan, dan sebagainya dalam pemakaian bahasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa wacana mengungkapkan subjek tertentu yang disebarkan kepada khalayak dan membentuk opini publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mills (dalam Sobur, 2006:11) menyatakan bahwa pengertian wacana terbagi menjadi tiga macam, yakni wacana dilihat dari level konseptual teoritis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan. Pada level konseptual teoritis, wacana diartikan sebagai domain umum dari semua pernyataan. Sementara, dalam konteks penggunaan, wacana diartikan sebagai sekumpulan pernyataan yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori konseptual tertentu. Lain halnya dengan metode penjelasan yang mengartikan wacana sebagai suatu praktik yang diatur untuk menjelaskan sejumlah pernyataan.

2.3 Berita sebagai Wacana Informasional

Pada dasarnya jenis wacana beragam, tergantung pada sudut pandang yang digunakan untuk membahasnya. Berdasarkan media penyampaian yang digunakan

wacana digolongkan menjadi wacana lisan dan wacana tulis. Berdasarkan tujuan berkomunikasi, wacana dapat dibedakan menjadi wacana deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi dan narasi. Merujuk pendapat Leech (dalam Kushartanti dan Lauder, 2008:91) berdasarkan fungsi bahasa, wacana dibedakan menjadi wacana ekspresif, wacana fatis, wacana informasional, wacana estetik dan wacana direktif.

Wacana informasional yaitu wacana yang bersumber pada pesan atau informasi, seperti wacana berita dalam media massa termasuk pemberitaan kasus Kalijodo. Hal tersebut dikarenakan wacana berita yang ada dalam media massa memberikan informasi tentang suatu peristiwa kepada khalayak. Semua lapisan masyarakat dapat mengonsumsi informasi wacana berita yang ada dalam media massa.

Menurut Sumadiria (2005:65), berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar menarik dan atau penting bagi sebagian khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *online*. Berita merupakan laporan peristiwa di lapangan yang telah memenuhi ke enam unsur berita (5W 1H), yaitu.

- 1) Apa (*What*) yang terjadi, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur *what*, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa.
- 2) Siapa (*Who*) yang terlibat, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur *who*, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa.
- 3) Kapan (*When*) peristiwa itu terjadi, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur *when*, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa.

- 4) Dimana (*Where*) peristiwa itu terjadi, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur *where*, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian.
- 5) Mengapa (*Why*) peristiwa itu terjadi, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsure *why*, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa.
- 6) Bagaimana (*How*) peristiwa itu terjadi, suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur *how*, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang yang ditimbulkan.

Selain memuat 5W+1H berita juga memiliki karakteristik. Karakteristik ini muncul karena berita akan dianggap bernilai, layak dibaca atau diketahui oleh pembaca atau pendengar jika memiliki karakteristik yang ada. Adapun karekteristik berita sebagai berikut.

- 1) Menyampaikan peristiwa yang aktual. Peristiwa yang diberitakan masih baru dan hangat diperbincangkan oleh masyarakat.
- 2) Data-data yang diberitakan sesuai dengan peristiwa aslinya dan lengkap. Tidak ada rekayasa dari penulis berita sehingga berita tersebut berdasarkan fakta yang ada dan data yang dipaparkan lengkap untuk meminimlisir pertanyaan yang muncul di otak pembaca.
- 3) Menggunakan bahasa yang menarik perhatian dan mudah dipahami oleh pembaca. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, jika terdapat istilah yang relatif sulit dimengerti disertakan penjelasannya dalam berita sehingga pembaca mudah untuk memahami isi berita tersebut.
- 4) Alur yang digunakan hendaknya runtut (kronologis).
- 5) Sumber berita valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 6) Tidak mencantumkan opini pribadi dan bersifat objektif. Jika diperlukan, mencantumkan suatu kutipan hasil wawancara mengenai suatu peristiwa yang sedang diberitakan.

2.4 Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis adalah sebuah proses penguraian untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang akan atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh Barker dan Galasinski (dalam Darma, 2009:50) bahwa analisis wacana kritis adalah suatu pendekatan yang relatif baru dari sistematika pengetahuan yang timbul dari tradisi teori sosial dan analisis linguistik yang kritis. Artinya, dalam analisis wacana kritis, wacana tidak semata-mata dipahami sebagai studi bahasa saja tetapi juga konteks.

Analisis wacana kritis pada dasarnya adalah untuk menjelaskan dimensi linguistik-kewacanaan fenomena sosial, kultural, dan proses perubahan modernitas. Analisis wacana kritis menggali secara mendalam unsur-unsur yang terdapat dalam suatu wacana. Dalam bangunan representasi suatu realita, analisis wacana kritis terkait dengan berbagai aspek seperti teks baik verbal maupun non-verbal dan juga non-teks seperti pemahaman internal sumber yang terkait dalam hal ini penulis maupun masyarakat. Analisis wacana kritis ini tidak dibatasi pada unsur teks saja karena wacana sendiri merujuk pada pemaknaan pendapat, dan ideologi. Demi mengetahui bagaimana makna yang tersembunyi dalam suatu teks tersebut, dibutuhkan suatu analisis kognisi dan konteks sosial.

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi, sehingga wacana diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu (Ariyanto, 2001:8). Konteks adalah hal yang berada diluar teks dan memengaruhi penggunaan bahasa, seperti tempat dimana suatu wacana diproduksi, partisipasi yang terlibat, dan sebagainya (Eriyanto, 2001:9).

Selain itu, analisis wacana kritis juga menganalisis faktor internal yang dimiliki oleh pembuat wacana. Salah satu faktor internal tersebut adalah ideologi. Ideologi merupakan sudut pandang seseorang dalam memandang dan menilai sesuatu. Eriyanto (2001:7) menyatakan bahwa praktik wacana bias jadi menampilkan ideologi. Ideologi menjadi dasar sudut pandang pembuat wacana dalam menanggapi

segala fenomena yang terjadi di sekitarnya. Jadi, melalui analisis wacana kritis, teks, konteks, yang menyebabkan terciptanya wacana, dan ideologi yang tercermin dalam wacana dianalisis.

2.5 Kerangka Analisis Wacana Kritis Van Dijk

Terdapat beberapa model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh para tokoh, diantaranya ada model analisis yang dikembangkan oleh Teun A Van Dijk. Van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga dapat digunakan secara praktis. Selain itu, van Dijk beranggapan bahwa penelitian wacana tidak hanya menganalisis teks saja karena teks sebagai hasil dari suatu praktek produksi yang harus diamati.

Pada model Teun A Van Dijk membagi wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dimensi teks, yang dianalisis adalah bagaimana strategi wacana yang meliputi tema, superstruktur (skematik), dan struktur makro (strategi semantik, sintaksis, retorik, dan stilistik). Dalam dimensi kognisi sosial yang dianalisis adalah bagaimana wacana diproduksi atau ideologi apa yang mendasari pembuat wacana. Pada konteks sosial yang dianalisis adalah keadaan yang terjadi di masyarakat sehingga mempengaruhi pembuatan wacana (Eriyanto, 2001:228). Dari beragam model analisis yang telah disebutkan, model analisis wacana van Dijk adalah yang sesuai dengan obyek pada penelitian ini karena dimensi teks, kognisi sosial dan konteks sosial dapat diidentifikasi pada objek dalam penelitian ini.

Kerangka analisis wacana kritis van Dijk dikembangkan dengan mengelaborasi semua unsur yang mempengaruhinya. Menurut van Dijk (dalam Eriyanto, 2001:224), wacana memiliki tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Dimensi teks adalah dimensi yang menunjukkan hasil dari suatu praktik produksi. Dimensi kognisi sosial adalah dimensi yang menghubungkan struktur sosial atau keadaan masyarakat dengan elemen wacana. Dimensi konteks

sosial adalah dimensi yang menunjukkan keadaan masyarakat yang memengaruhi munculnya wacana. Dalam dimensi teks yang diteliti adalah struktur teks dan strategi wacana yang digunakan untuk menegaskan suatu tema tertentu. Dalam dimensi kognisi sosial yang diteliti adalah bagaimana produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu pembuat wacana. Dimensi konteks sosial menganalisis apa yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta wacana (Eriyanto, 2001:224). Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.5.1 Teks

Teks merupakan bagian dari wacana. Dalam hal ini, analisis teks bertujuan untuk mengungkap tujuan dari suatu teks. Menurut Guy Cook (dalam Eriyanto, 2001:9), teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang dicetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra dan sebagainya. Teks menjadi salah satu dimensi atau tingkatan yang dianalisis dalam kerangka analisis wacana kritis van Dijk.

Van Dijk membagi elemen wacana ini dalam tiga tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Akan tetapi, wacana terdiri atas berbagai elemen, semua elemen tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling terkait, berhubungan, dan mendukung satu sama lainnya. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu teks. Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian tersusun secara utuh. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar (Eriyanto, 2001: 227).

Tabel 2.1 Kerangka Analisis Dimensi Teks

Struktur wacana	Hal yang diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik (apa yang dikatakan?)	Topik
Superstruktur	Skematik (bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?)	Skema
Struktur mikro	Semantik (makna yang ingin ditekankan dalam teks)	Latar, detail, maksud, pra anggapan, nominalisasi
Struktur mikro	Sintaksis (bagaimana pendapat disampaikan?)	Bentuk kalimat, koherensi, kata ganti
Struktur mikro	Stilistik (pilihan kata apa yang dipakai?)	Leksikon
Struktur mikro	Retoris (bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan?)	Grafis, Metafora, Ekspresi

Berkaitan dengan ruang lingkup dan batasan penelitian, selanjutnya akan dijelaskan aspek-aspek yang membahas dimensi teks yang berupa strategi semantik dan strategi retorik.

1) Strategi semantik

Strategi semantik adalah cara yang digunakan oleh pembuat wacana untuk membangun makna tentang suatu peristiwa dalam teks. Hal ini sejalan dengan

pendapat van Dijk (dalam Sobur, 2006:78) menyatakan bahwa semantik dalam skema analisis van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal, yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks. Strategi semantik tidak hanya digunakan untuk mendefinisikan bagian mana yang penting dari struktur wacana tapi juga mengarahkan pembaca ke arah tertentu dari suatu peristiwa. Strategi semantik dilakukan dengan memanfaatkan beberapa elemen, yaitu: latar, detil, maksud, pra anggapan dan nominalisasi.

2) Strategi Retoris

Strategi retoris adalah cara yang dilakukan oleh pembicara atau penulis untuk menarik perhatian khalayak terhadap informasi yang disampaikan. Menurut Sobur (2006:84) pemakaian strategi retoris, diantaranya dengan menggunakan gaya repetisi (pengulangan), aliterasi (pemakaian kata-kata yang permulaannya sama bunyi seperti sajak), sebagai suatu strategi menarik perhatian, dan untuk menekankan sisi tertentu agar diperhatikan oleh khalayak. Berkaitan dengan strategi retoris dalam sebuah wacana terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan, yaitu pilihan kata, grafis, metafora, dan ekspresi.

Pembahasan strategi retoris dalam penelitian ini difokuskan pada elemen pilihan kata saja. Elemen pilihan kata berkaitan dengan proses pemilihan kata yang digunakan oleh penulis. Hal ini sejalan dengan pendapat Eriyanto (2001:255) yang menyatakan bahwa pilihan kata yang dipakai tidak semata hanya karena kebetulan, tetapi secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas. Oleh karena itu, pilihan kata menunjukkan daya tarik tersendiri untuk mengungkapkan makna yang ada dalam wacana. Berikut adalah contoh penggunaan pilihan kata pada *jingle* pemerintah Orde Baru.

Tabel 2.2 Contoh Teks Berisi Elemen Pilihan Kata

Mari kita laksanakan wajib belajar. Putra-Putri tunas Bangsa harapan Negara. Wajib belajar cerdasakan kehidupan bangsa, ‘tuk menuju masyarakat adil sejahtera. **Gunakan** waktumu, **isilah** hidupmu. **Teruslah** belajar, **giatlah** bekerja. Berantas kebodohan perangi kemiskinan. Menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Teks di atas menunjukkan leksikon yang digunakan untuk menyatakan program wajib belajar dapat memberi perubahan bagi masyarakat Indonesia adalah “menggunakan waktu” dan “mengisi hidup”. Selanjutnya pada kalimat keempat “teruslah belajar” dan “giatlah bekerja”. Penggunaan leksikon tersebut mampu memberi daya tarik karena dapat mempersuasif masyarakat untuk melaksanakan program tersebut. Maksud dari pelaksanaan program wajib belajar adalah untuk meminimalkan tingkat kebodohan di Indonesia dengan mempergunakan waktu semaksimal mungkin dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat.

2.5.2 Kognisi Sosial

Menurut van Dijk (dalam Eriyanto, 2001:267) analisis kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental wartawan membantu memahami fenomena tersebut sebagai bagian dari proses produksi suatu berita. Analisis kognisi sosial menekankan bagaimana peristiwa difahami, didefinisikan, dianalisis dan ditafsirkan. Peristiwa yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh wartawan yang berbeda tergantung kondisi atau kesadaran mental masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa proses produksi suatu teks tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai atau kepercayaan, pengetahuan, pengalaman, dugaan atau prasangka-prasangka, dan ideologi yang diterima sebagai bagian dari anggota suatu komunitas masyarakat.

Pada penelitian ini yang diteliti adalah aspek ideologi. Ideologi merupakan suatu sistem nilai atau kepercayaan yang diterima sebagai suatu fakta atau kebenaran oleh kelompok-kelompok tertentu. Ariyono (dalam Yoce, 2009:56) menyatakan bahwa ideologi sebagai rangkaian konsep untuk melaksanakan cita-cita yang diidam-idamkan oleh sekelompok golongan, gerakan atau Negara tertentu.

Ideologi dapat dipahami dari sisi emik dan etik. Ideologi yang dipandang dari sisi emik berupa keadaan realita yang ada di masyarakat. Pada sisi emik ideologi memandang realita tersebut sesuai dengan filsafat yang menjiwai ideologi tersebut. Sitepu (2012:156) mengemukakan bahwa ideologi adalah suatu sistem rancangan dasar baik tentang keadaan yang ideal yang hendak dicapai untuk menggantikan keadaan yang tidak memuaskan, maupun tentang jalan untuk mencapainya yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang dengan berdasarkan interpretasi atau keadaan yang tidak memuaskan itu dengan bertitik tolak dari suatu filsafat tertentu sebagai presuposisinya.

Berbeda halnya dengan emik, ideologi yang dipandang dari sisi etik berupa pandangan-pandangan tentang keadaan ideal terhadap realita dan permasalahan yang ada. Pandangan-pandangan tersebut mengenai bagaimana realitas itu terjadi dan cara atau strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencapai keadaan ideal. Hal ini sejalan dengan pendapat Sitepu (2012:157) yang menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan hidup menunjuk kepada kehidupan manusia yang ideal. Dalam hubungan ini ideologi memiliki watak untuk memberikan harapan, dorongan, dan rangsangan untuk bertindak dan bersikap.

Berdasarkan penelitian awal, ideologi tersembunyi yang dominan dibalik wacana berita kasus Kalijodo adalah ideologi Pancasila dan ideologi politik. Hal tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

1) Ideologi Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang ditetapkan sebagai ideologi bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, segala tindakan dan pengambilan keputusan dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang

lebih baik didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi ini membawa misi untuk mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, dalam sila-sila Pancasila terdapat nilai-nilai tertentu yang dikenal dengan istilah “Eka Prasetya Panca Karsa”. Menurut Samsuri (2004:226) nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila terdiri dari 36 butir. Hal tersebut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Tiga Puluh Enam Butir Pancasila

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	1.Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2.Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup 3.Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4.Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	5. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 6. Saling mencintai sesama manusia. 7. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 8. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

	<p>9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.</p> <p>10. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</p> <p>11. Berani membela kebenaran dan keadilan.</p> <p>12. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.</p>
Sila Persatuan Indonesia	<p>13. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.</p> <p>14. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>15. Cinta Tanah Air dan Bangsa.</p> <p>16. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.</p> <p>17. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.</p>
Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan	<p>18. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.</p> <p>19. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.</p> <p>20. Mengutamakan musyawarah</p>

	<p>dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.</p> <p>21. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.</p> <p>22. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.</p> <p>23. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.</p> <p>24. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.</p>
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	<p>25. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.</p> <p>26. Bersikap adil.</p> <p>27. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.</p> <p>28. Menghormati hak-hak orang lain.</p> <p>29. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.</p> <p>30. Menjauhi sikap pemerasan</p>

	terhadap orang lain. 31. Tidak bersifat boros. 32. Tidak bergaya hidup mewah. 33. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 34. Suka bekerja keras. 35. Menghargai hasil karya orang lain. 36. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
--	---

2) Ideologi Politik

Ideologi politik adalah gabungan dari nilai-nilai, ide, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan sikap tingkahlaku politik terhadap suatu kejadian dan permasalahan politik yang dihadapi (Budiardjo, 2003:8). Nilai-nilai dan ide tersebut merupakan satu sistim yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adanya keyakinan dan kepercayaan terhadap tata tertib sosial di masyarakat untuk mencapai politik yang ideal.

Ideologi politik yang berkembang di masyarakat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dimana ia berada dan sering mengadakan kompromi maupun perubahan-perubahan yang cukup luas. Ideologi tersebut digunakan sebagai alat kritik, legitimasi, dan penggerak seseorang untuk berperilaku politik sesuai dengan perintah dari pemegang kekuasaan. Contoh dari perilaku politik dapat ditunjukkan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dijadikan alat untuk merespon apakah kebijakan tersebut sesuai dengan yang ada di masyarakat atau tidak, jika sesuai maka kebijakan akan diterima dan jika sebaliknya akan adanya penolakan terhadap kebijakan tersebut

2.5.3 Konteks Sosial

Konteks sosial merupakan keadaan masyarakat yang melatar belakangi munculnya suatu wacana. Eriyanto (2001:271) menyatakan bahwa wacana adalah bagian dari apa yang berkembang di masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis inter tekstual dengan meneliti bagaimana wacana itu dihasilkan dan dikonstruksi dalam masyarakat. Titik penting dari analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan legitimasi.

Pada penelitian ini, konteks sosial dianalisis untuk mendeskripsikan keterkaitan antara wacana yang bergejolak di masyarakat dengan konteks sosial yang terdapat dalam berita kasus Kalijodo. Selanjutnya konteks tersebut digunakan untuk memahami wacana secara mendalam. Berdasarkan penelitian di awal, konteks sosial tersebut meliputi konteks politik, konteks hukum, konteks ekonomi, dan budaya yang akan diuraikan sebagai berikut.

1) Konteks Sosial Politik

Politik merupakan usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Usaha-usaha tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kelompok tertentu. Oleh karena itu, politik terkait erat dengan beberapa faktor seperti : kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, dan alokasi nilai dari sumber daya yang ada.

Dalam wacana terkait pemberitaan kasus Kalijodo, konteks politik dianalisis berdasarkan paparan wacana yang berkembang di masyarakat, adanya pro-kontra tentang program penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo yang akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau.

2) Konteks Sosial Hukum

Priyanto (2008:8) menyatakan bahwa hukum adalah petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan undang-undang dan norma yang berlaku di masyarakat.

Hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Hukum pidana merupakan peraturan yang memuat tentang tindak kejahatan serta memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Hukum perdata merupakan peraturan yang memuat tentang kepentingan individu, seperti perkawinan, perceraian, dan kegiatan usaha. Hukum tata negara merupakan peraturan yang memuat tentang kegiatan administrasi negara, wilayah, kebijakan pemerintah, dan struktur pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, konteks hukum pada pemberitaan kasus Kalijodo dianalisis berdasarkan paparan wacana yang berkembang di masyarakat, adanya landasan hukum tentang program penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo yang akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Hal tersebut didapatkan dari referensi buku maupun media internet, seperti artikel.

3) Konteks Sosial Ekonomi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga dan waktu yang berharga. Oleh karena itu, konteks ekonomi berhubungan erat dengan pemanfaatan sumber daya melalui strategi tertentu dalam suatu kelompok masyarakat, organisasi atau Negara untuk mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, konteks ekonomi pada pemberitaan kasus Kalijodo dianalisis berdasarkan paparan wacana yang berkembang di masyarakat saat itu, sindiran atau kritikan tentang kegiatan perekonomian yang ada di kawasan

Kalijodo. Hal tersebut didapatkan dari referensi buku maupun media internet, seperti program *youtube* dan laman.

4) Konteks Sosial Budaya

Budaya merupakan pola hidup manusia yang berkembang dalam suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut KBBI budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rapph Linton (1952:1) budaya adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, konteks budaya pada pemberitaan kasus Kalijodo dianalisis dengan melihat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kalijodo yang sudah diwariskan oleh leluhur. Hal tersebut dapat dilihat dari pola pikir masyarakat Kalijodo berdasarkan adat-istiadat dan keyakinannya.

2.6 Kalijodo dalam Perkembangan Jakarta

Pembahasan seputar Kalijodo dalam perkembangan Jakarta meliputi awal mula berdirinya Kalijodo, Berkembangnya Prostitusi, Judi dan Preman di Kalijodo, dan Pengembalian fungsi sebagai ruang terbuka hijau.

2.6.1 Awal Mula Berdirinya Kalijodo

Nama Kalijodo menjadi bahan pembicaraan karena merupakan kawasan lokalisasi yang marak dengan tempat hiburan malam yang akan ditertibkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Kalijodo merupakan tempat hiburan malam yang terletak di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara. Sebagian lokalisasi itu masuk wilayah Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Kalijodo sudah ada sejak masa awal VOC di tahun 1642. Di era 1930-an, Kalijodo menjadi tempat pedagang Tionghoa singgah. Di tahun 1970-an, kompleks

prostitusi mulai muncul di bantaran Kali Angke. Awalnya, terdiri dari gubuk-gubuk kecil dan kemudian berkembang jadi lokasi prostitusi. Wilayah itu disebut Kalijodo karena bantaran kali di sana pada 1950-an menjadi tempat nongkrong muda-mudi Jakarta hingga banyak yang berjodoh. Selama 20 tahun, ketika pendatang bertambah, kali menjadi kotor dan Kalijodo menjadi tempat selingkuh, hingga akhirnya menjadi lokasi prostitusi pada 1970.

Lokalisasi Kalijodo memiliki nilai sejarah dalam perkembangan kota Jakarta. Dulunya, Kalijodo adalah sebuah lokasi sentral ekonomi yang menghidupkan Jakarta. Asal mula Kalijodo itu sendiri sebenarnya merupakan tempat persinggahan etnis Tionghoa yang mencari gundik atau selir. Pada masa kekuasaan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), mayoritas penduduk yang ada di sana adalah etnis Tionghoa. Masyarakat berlatar belakang etnis Tionghoa ini adalah orang-orang yang melarikan diri dari Manchuria. Wilayah yang dulunya terletak di dekat perbatasan Korea Utara dan Rusia ini sedang mengalami perang. Saat melarikan diri ke Batavia, mereka tidak membawa istri, sehingga mereka pun akhirnya mencari gundik atau pengganti istri di Batavia. Dalam proses pencarian gundik, mereka kerap kali bertemu di kawasan bantaran sungai. Lalu tempat yang dijadikan pertemuan pencarian jodoh dinamakan Kalijodo. Dalam bahasa Jawa artinya “Sungai Bertemunya Jodoh”. (Kompas.2016, Februari 12. Inilah Sejarah Kawasan Kalijodo. Jakarta, Kompas TV: *Public Broadcasting Service*).

2.6.2 Berkembangnya Prostitusi, Judi dan Preman di Kalijodo

Kalijodo mengalami perkembangan yang cukup pesat karena letaknya yang strategis. Banyak orang dari kelas ekonomi ke bawah mencari hiburan ke Kalijodo. Tak hanya prostitusi, penguasa wilayah di Kalijodo akhirnya juga membuka lapak-lapak perjudian. Dari perjudian inilah kemudian muncul sistem pengamanan alias premanisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Lokasi ini sering terjadi pertikaian antar banyak kubu. Misalnya yang terjadi pada tahun 2001, waktu ada bentrok antar etnis di Kalijodo. Daeng Azis, penguasa Kalijodo juga disebut-

sebut sebagai orang yang menodongkan pistol ke arah Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti. Pada saat itu, Krisna bertugas sebagai Kapolsek Penjaringan dan menyandang pangkat Ajun Komisaris Besar. (Rizal. 2016. Inl 5 Alasan Masuk Akal Kenapa Kawasan Kalijodo Harus Ditertibkan.<http://www.idntimes.com/rizal/ini-5-alasan-masuk-akal-kenapa-kawasan-kalijodo-harus-ditertibkan>. [22 Juli 2016])

Tindakan pembakaran yang ditunjukkan oleh pelaku kekerasan setiap terjadi pertengkaran antar geng di Kalijodo. Contohnya adalah peristiwa 22 Februari 2002 dini hari, yang pernah ditulis di harian Kompas, 4 Maret 2002. Kerugian yang mencapai ratusan rumah yang terbakar menyebabkan pemerintah daerah dan aparat menjadi peduli. Hal itu sebatas membongkar semua bangunan yang setiap orang tahu jelas melanggar peraturan karena didirikan di atas bantaran dan tanggul banjir kanal dan Kali Angke, yang masih berlangsung hingga Kamis (28/2/2002). Dengan tindakan itu, aparat berharap, Kalijodo "bersih" dari pelanggaran-pelanggaran lainnya, yakni perjudian dan pelacuran.

Kalijodo telah memiliki penguasa sendiri semacam "mafia". Krishna Murti yang saat itu yang menjabat sebagai Kapolsek Penjaringan, Jakarta Utara menyebutkan bahwa terdapat lima bos besar di situ, yakni Riri yang bergandengan dengan Agus, H Usman, Aziz, Bakri, dan Ahmad Resek. Mereka mengkaveling Kalijodo sebagai daerah kekuasaan mereka. Menurut Krishna Murti, para bos itu tidak mengelola perjudian. Mereka hanya menyediakan tempat dan menerima sewa dari operator judi yang merupakan etnis Tionghoa sekaligus menjamin keamanan berlangsungnya perjudian. Artinya, tidak akan diganggu oleh siapa pun, aparat, apalagi organisasi massa. Untuk menjamin keamanan di lapangan, setiap bos mempekerjakan "tenaga keamanan" dalam jumlah yang cukup besar.

Menurut catatan Polsek Penjaringan kala itu, paling banyak adalah "anak buah" H Usman, sedikitnya 500 orang. Lainnya antara 200-300 orang. Maka dari itu, di Kalijodo, terdapat sedikitnya 1.000 "tenaga keamanan" yang siap melakukan apa saja bila ada yang mencoba mengganggu perjudian di situ. Upah rata-rata setiap

"anggota keamanan" sebesar Rp 30.000 per malam. Para "tenaga keamanan" itu umumnya datang dari luar Jakarta, misalnya dari Banten dan Makassar atau daerah lain di Sulawesi.

2.6.3 Pengembalian Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Kawan Kalijodo merupakan tempat yang dibangun di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bangunan liar dalam bentuk apapun, tentu dilarang ada di atas RTH. Pendirian bangunan di atas RTH bisa melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan kebijakan menata kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau berdasarkan pada UU No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Penertiban kawasan Kalijodo akan dilakukan setelah penerbitan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar (SPB).

Saat Gubernur Jakarta mulai mengumumkan rencana penggusuran Kalijodo, sempat muncul ketegangan tinggi, setelah penentangan keras disuarakan oleh para penghuni dan pengelola bar serta rumah-rumah pelesiran Kalijodo. Ia ingin mengembalikan kawasan seluas 1,5 hektar itu menjadi kawasan hijau sebagaimana peruntukannya. Kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau tersebut telah lama beralih fungsi jadi tempat prostitusi dan perjudian. Pemerintah akan mengubah lokalisasi itu menjadi jalan inspeksi dan ruang terbuka hijau. Alasannya, Jakarta baru memiliki 10 persen ruang terbuka hijau dari 30 persen yang ditargetkan. Kawasan yang ramai bisnis prostitusi sejak puluhan tahun itu akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Kalijodo sebelumnya tak tersentuh penertiban pemerintah karena adanya preman yang kuat menguasai daerah tersebut. Namun kini, penertiban Kalijodo tinggal di depan mata dan sejumlah alat berat sudah disiagakan. Langkah pasca penertiban adalah kawasan Kalijodo akan ditanami pohon dan rumput setelah rata dengan tanah. Langkah ini merupakan langkah awal untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) di atas lahan seluas 1,5-2,5 hektar itu. Setelah itu, Pemprov DKI Jakarta akan membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan taman di kawasan itu.

Meskipun dikenal sebagai kawasan prostitusi, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa pembongkaran Kalijodo tidak terkait prostitusi. Dalam surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, yang ditempelkan di setiap sudut Kalijodo, tertulis bahwa tujuan pengusuran berkaitan dengan pengembalian fungsi kawasan Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau sesuai dengan peta zonasi yang menunjukkan kawasan Kalijodo termasuk dalam zona hijau. Karena luas lahannya yang besar, Pemprov DKI juga akan membangun lapangan bola di sana. (Carina. 2016. Membangun “Taman Pertaubatan” Di Atas Puing-Puing Bongkaran Kalijodo. <http://internasional.kompas.com/read/2016/02/29/05591051/Membangun.Taman.Pertaubatan.di.Atas.Puing-puing.Bongkaran.Kalijodo>. [22 Juli 2016]).

BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah penelitian yang meliputi : (1) Jenis dan Rancangan Penelitian, (2) Data dan Sumber Data, (3) Teknik Pengumpulan Data, (4) Teknik Analisis Data, (5) Instrumen Penelitian, dan (6) Prosedur Penelitian.

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang melakukan penelitian pada latar alamiah dan pada konteks tertentu (Moleong, 2001:4). Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian kualitatif terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal tanpa manipulasi keadaan dan kondisinya, pengambilan data dilakukan secara alami, dan menekankan pada deskripsi secara alami (Arikunto, 2006:12). Berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan dilaksanakan pada latar alamiah tanpa melakukan perubahan data.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian tersebut, maka rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif Analisis Wacana Kritis (AWK). Rancangan penelitian kualitatif Analisis Wacana Kritis (AWK) model van Dijk dalam penelitian ini, digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan pilihan kata, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi yang terdapat pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, frasa atau kalimat yang terdapat pada teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Hal tersebut didukung dengan pendapat Moleong (2012;11) bahwa pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disusun, data yang dianalisis pada aspek strategi retorik adalah kata-kata tertulis pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas. Pada aspek konteks sosial dan ideologi, data yang dianalisis adalah kata-kata tertulis yang mengandung konteks sosial tertentu serta informasi dari sumber lain seperti surat kabar, televisi, dan artikel mengenai kasus Kalijodo yang berkembang di masyarakat. Berkaitan dengan data-data tersebut dapat diperoleh sumber data tertentu.

Sumber data adalah subjek yang menunjukkan dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini adalah pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas, hasil wawancara dengan penduduk yang tinggal di kawasan Jakarta Utara, video tentang sejarah Kalijodo, dan buku-buku terkait pemberitaan kasus Kalijodo.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tulisan, seperti teks berita kasus Kalijodo, berita di televisi, buku, dan sumber-sumber terkait tentang kasus Kalijodo.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu : (1) membuka laman, (2) membaca, (3) memilih artikel, dan (4) mengunduh.

1) Membuka laman,

Pertama menghidupkan laptop dan mengoneksikannya dengan jaringan internet. Kedua membuka aplikasi *mozilla* dengan mengeklik dua kali. Ketiga menuliskan www.kompas.com pada tab atau jendela *mozilla* dan mengeklik tulisan *search*. Setelah muncul laman kompas.com pada mesin pencari di laman tersebut menuliskan kata kunci 'berita Kalijodo' dan mengeklik *search*.

2) Membaca

Tulisan-tulisan yang sudah ditemukan dalam proses pencarian kemudian dibaca guna mendapatkan data-data yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian tentang pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

3) Memilih artikel,

Setelah terkumpul materi yang dibutuhkan kemudian dipilih artikel yang secara khusus terkait dengan judul penelitian. Hal ini dilakukan guna mendukung agar pembahasan penelitian lebih fokus dan tidak melebar.

4) Mengunduh

Tulisan-tulisan yang sudah ditemukan dalam proses pencarian kemudian diunduh dengan menyimpan laman kompas.com di laptop menggunakan klik kanan kemudian klik *save*. Pengunduhan dilakukan untuk mendokumentasikan sehingga proses analisis data menjadi lebih mudah.

Teknik dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan kalimat-kalimat yang tertulis dalam pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas. Hal ini sejalan dengan pendapat Bungin (dalam Gunawan, 2013;177) menyatakan bahwa teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Data yang dikumpulkan berupa kalimat digunakan untuk keperluan strategi retorik, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi.

Selain teknik dokumentasi, teknik wawancara juga digunakan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai masalah sosial di kawasan Kalijodo. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang untuk memperoleh informasi

dari seseorang lainnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Muhajir, 1996;180). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas mendalam. Hasil wawancara akan digunakan untuk mengecek kebenaran fakta yang terdapat pada pemberitaan kasus Kalijodo serta digunakan untuk proses analisis konteks sosial dan ideologi tersembunyi.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Menurut Miles dan Hiberman (dalam Sugiyono, 2014:337) terdapat tahapan-tahapan tertentu dalam analisis data, tahapan-tahapan tersebut adalah reduksi data, penyajian data, penarikan data dan verifikasi temuan. Tahapan analisis data yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan membaca dan mencermati bagian-bagian teks sesuai dengan rumusan masalah, mengklasifikasikan data-data yang ditemukan berdasarkan rumusan masalah, dan memberikan kode pada data yang telah didapatkan. Ketiga kegiatan tersebut akan dijelaskan pada kegiatan berikut.

- a. Pemilihan data dilakukan dengan memilih kata-kata yang terdapat pada pemberitaan kasus Kalijodo yang membahas tentang politik dan perkembangan prostitusi Kalijodo
- b. Data yang telah didapatkan, dikategorikan berdasarkan gejala-gejala yang menunjukkan adanya strategi retorik pada aspek pilihan kata, ideologi tersembunyi, dan konteks sosial. Setelah data dikategorikan, akan dilakukan pengodean.
- c. Data yang telah dikategorikan, diberi kode-kode tertentu yang menunjukkan elemen-elemen kerangka analisis wacana kritis van Dijk yang meliputi strategi retorik, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi. Pengodean dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Sret untuk strategi retorik.
 Idep untuk ideologi Pancasila.
 Idepol untuk ideologi politik
 Kpol untuk konteks politik.
 Khuk untuk konteks hukum.
 Keko untuk konteks ekonomi.
 Kbud untuk konteks budaya.

Berikut adalah contoh tabel pengodean pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

Table 3.1 Contoh Pengodean

No	Data	Kode	Interpretasi
1	“Pasalnya, pada bulan Maret, Jakarta akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI)	Kpol:1	Kode pada data di samping menunjukkan bahwa data tersebut merupakan data pertama konteks politik

2) Penyajian Data

Tahap kedua dalam melakukan analisis data kualitatif adalah penyajian yaitu mengumpulkan informasi yang memunculkan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan data yang telah tersusun dan juga memberikan kemungkinan untuk dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan teks yang bersifat dekskriptif berdasarkan kategori pilihan kata, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pilihan kata disajikan dengan mendeskripsikan leksikon penekanan, leksikon upaya, dan leksikon perintah.

- b. Konteks sosial disajikan dengan mendeskripsikan kategori konteks sosial yang meliputi konteks politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang terdapat dalam pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.
- c. Ideologi disajikan dengan mendeskripsikan ideologi Pancasila dan ideologi politik yang terdapat pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Temuan

Tahap terakhir yang dilaksanakan oleh peneliti pada teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan kesimpulan yang meliputi pilihan kata, konteks sosial, dan ideologi tersembunyi yang terdapat dalam teks berita kasus Kalijodo.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti. Peneliti terlibat secara langsung dalam proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2006:160) yang mengemukakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Selain instrumen utama terdapat instrumen lainnya, yaitu instrumen pemandu pengumpul data dan instrumen pemandu analisis data. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Instrumen Pemandu Pengumpul Data

Instrumen pemandu pengumpul data digunakan untuk membantu proses pengumpulan data. Instrumen pengumpul data berupa tabel pemandu pengumpul data. Tabel pemandu pengumpul data terdiri atas, tabel pengumpul data strategi retorik, tabel pengumpul data konteks sosial, dan tabel pengumpul data ideologi tersembunyi yang terdapat dalam teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas.

2) Instrumen Pemandu Analisis Data

Instrumen pemandu analisis data digunakan untuk membantu proses analisis data. Instrumen analisis data berupa tabel pemandu analisis data. Tabel pemandu analisis data terdiri atas, tabel analisis data strategi retorik, tabel analisis data konteks sosial, dan tabel analisis data ideologi tersembunyi yang terdapat dalam teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas.

3.6 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian digunakan sebagai panduan langkah-langkah penelitian agar penelitian berjalan lancar dan sistematis. Prosedur penelitian secara umum terdiri atas tiga tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Ketiga tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Tahap persiapan

Terdapat beberapa kegiatan dalam tahap persiapan. Pertama, pemilihan dan penetapan judul penelitian. Judul penelitian dipilih dan ditetapkan berdasarkan minat kemampuan peneliti dan mendapat persetujuan komisi bimbingan serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Kedua, penelusuran pustaka berkaitan dengan penentuan teori yang digunakan dalam penelitian. Ketiga, penyusunan metode penelitian berkaitan dengan penentuan jenis, rancangan penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan instrumen penelitian. Keempat, pembuatan instrumen pengumpul dan analisis data. Kelima penyusunan proposal penelitian.

2) Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain, pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan hasil penelitian. Pada tahap ini, kegiatan pengumpulan data dan analisis data dilakukan dengan bantuan instrumen pemandu pengumpul data dan instrument pemandu analisi data. Selanjutnya kesimpulan, hasil penelitian dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Hasil analisis data disimpulkan untuk kemudian dipaparkan pada bab 4 dan bab 5.

3) Tahap penyelesaian

Tahap terakhir adalah tahap penyelesaian yang terdiri atas kegiatan, penyusunan laporan penelitian, revisi laporan penelitian, dan penggandaan laporan. Laporan penelitian disusun berdasarkan buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* yang diterbitkan Jember University Press. Laporan tersebut dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan saran dan arahan untuk menyempurnakan laporan penelitian tersebut. Setelah laporan direvisi, laporan tersebut digandakan sesuai dengan kebutuhan.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab 5 akan dipaparkan kesimpulan dan saran dalam penutup penelitian ini. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini secara berurutan akan dijelaskan pada bagian berikut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun Van Dijk, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberitaan kasus Kalijodo terdapat strategi retorik berupa pilihan kata, konteks sosial, dan ideologi. Pilihan kata atau leksikon yang terdapat dalam pemberitaan kasus Kalijodo adalah leksikon penekanan, leksikon upaya, dan leksikon perintah. Pilihan kata atau leksikon yang terdapat dalam pemberitaan kasus Kalijodo mencerminkan konteks sosial tertentu. Konteks sosial yang terdapat dalam pemberitaan kasus Kalijodo terdiri atas konteks politik berupa politik demokrasi dan politik kebijakan pemerintah, konteks ekonomi berupa ekonomi pemerintah dan ekonomi masyarakat, konteks hukum berupa hukum tindak kejahatan, hukum kegiatan usaha, dan hukum pengelolaan administrasi negara, dan konteks budaya berupa pola perilaku dan adatistiadat. Selain konteks sosial tersebut dalam pemberitaan kasus Kalijodo juga tercerminkan ideologi Pancasila dan ideologi politik. Ideologi Pancasila terdiri dari nilai-nilai keagamaan, prinsip kerakyatan, dan prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi politik terdiri atas, pembentukan kepribadian individu dan keselarasan norma-norma dalam masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Teun Van Dijk, yang terdapat pada bab empat, hal-hal yang dapat disarankan sebagai berikut.

Pertama, mahasiswa dan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, disarankan untuk bahan diskusi dalam mata kuliah Analisis Wacana khususnya pada materi Analisis Wacana Kritis.

Kedua, peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis disarankan untuk mengembangkan kajian pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas pada elemen-elemen wacana lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Elemen-elemen wacana tersebut terdiri dari, strategi semantik, strategi sintaksis, strategi stilistik, dan strategi retorik pada aspek metafora, grafis, dan ekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardi, Yuvita. 2016. *Analisis Wacana Kritis Pada lirik Jingle Program Pemerintah Orde Baru*. Tidak dipublikasikan. Skripsi. Jember:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Badara, Aris. 2014. *Analisis Wacana:Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Chaer, Abdul. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung:Yrama Widya.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta:LKIS Printing Cemerlang.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana. 2005. *Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Murti, Krishna. 2004. *Geger Kalijodo*. Jakarta:Ideapress.
- Prasetya. 2011. *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 6 (1) : 31-33.
- Prihatini, Arti.2014. *Analisis Wacana Kritis “Wayang Durangpo” Karya Sujiwo Tejo Pada Rubrik “Senggang” di surat kabar “Jawa Pos”*. Tidak dipublikasikan. Skripsi. Jember:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Sitepu, P.Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Sukatman. 2005. Apakah Wacana itu?, *Lingua Franca: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 5 (2): 118-119.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:Badan Penerbit Universitas Jember.

Internet

Carina, Jessi. 2016. *Membangun “Taman Pertaubatan” Di Atas Puing-Puing Bongkaran*.[Http://internasional.kompas.com/read/2016/02/29/05591051/Membangun.Taman.Pertaubatan.di.Atas.Puing-puing.Bongkaran.Kalijodo](http://internasional.kompas.com/read/2016/02/29/05591051/Membangun.Taman.Pertaubatan.di.Atas.Puing-puing.Bongkaran.Kalijodo). [22 Juli 2016]

Kompas. 2016. *Inilah Sejarah Kawasan Kalijodo*. Jakarta, Kompas TV: *Public Broadcating Serice*.
[Http://tv.kompas.com/read/2016/02/12/4752351615001/inilah.sejarah.kawasan.kalijodo](http://tv.kompas.com/read/2016/02/12/4752351615001/inilah.sejarah.kawasan.kalijodo). [22 Juli 2016]

Rizal. 2016. *Inilah 5 Alasan Masuk Akal Kenapa Kawasan Kalijodo Harus Ditertibkan*. [Http://www.idntimes.com/rizal/ini-5-alasan-masuk-akal-kenapa-kawasan-kalijodo-harus-ditertibkan](http://www.idntimes.com/rizal/ini-5-alasan-masuk-akal-kenapa-kawasan-kalijodo-harus-ditertibkan). [22 Juli 2016]

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN A. MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Metode Penelitian					
		Jenis dan Rancangan Penelitian	Data dan Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data	Instrumen Penelitian	Prosedur Penelitian
Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas	<p>1. Bagaimanakah stategi retorik yang berupa pilihan kata pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas?</p> <p>2. Bagaimanakah konteks sosial pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas?</p> <p>3. Bagaimanakah</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif.</p> <p>Rancangan penelitian kualitatif</p> <p>Analisis Wacana Kritis (AWK)</p> <p>model Teun van Dijk.</p>	<p>1. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata, frasa atau kalimat yang terdapat pada teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas, dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, buku-</p>	<p>1. Teknik dokumentasi</p> <p>2. Teknik wawancara</p>	<p>1. Reduksi data</p> <p>2. Penyajian data</p> <p>3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan</p>	<p>1. Peneliti</p> <p>2. Instrumen pengumpul data (leptop, alat tulis, bocknote, dan tabel pemandu pengumpul data)</p> <p>3. Instrumen analisis data</p>	<p>1. Tahap persiapan</p> <p>2. Tahap pelaksanaan</p> <p>3. Tahap penyelesaian</p>

	ideologi pada pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas?		buku referensi atau sumber lain yang berkaitan dengan pemberitaan kasus Kalijodo. 2.Sumber data berupa pemberitaan kasus Kalijodo di laman Kompas, hasil wawancara dengan penduduk yang tinggal di kawasan Jakarta Utara, video tentang sejarah Kalijodo, dan buku-buku terkait pemberitaan kasus Kalijodo.			(tabel pemandu analisis data)	
--	---	--	--	--	--	-------------------------------	--

LAMPIRAN B. BERITA KALIJODO DI LAMAN KOMPAS

AHOK: BULAN INI KALIJODO HARUS BERES



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghampiri warga seusai peresmian sepuluh taman di taman Jagakarsa.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan penertiban kawasan Kalijodo harus dilakukan bulan Februari ini. Pasalnya, pada bulan Maret, Jakarta akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI). "Kami lagi lihat dulu apakah mau sebelum jadi tuan rumah OKI atau sesudah (KTT OKI). Saya inginnya sih sebelum Jakarta jadi tuan rumah, bulan ini (Kalijodo) harus diberesin," kata Basuki, di Balai Kota, Senin(15/2/2016).

Basuki mengatakan, rencananya hari ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian akan memimpin rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo. Namun, Basuki memastikan tidak akan menghadiri rapat koordinasi tersebut. "Kapolda akan mendengarkan semuanya, dari pihak RT dan RW, karena ini kan kasusnya berbeda. Berbeda dengan kawasan (lokalisasi) Dolly (Surabaya) yang memang itu kampung," kata Basuki. Rencananya, kawasan Kalijodo akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau. Penertiban kawasan Kalijodo akan ditertibkan setelah penerbitan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar (SPB).

Penulis : Kurnia Sari Aziza

KALIJODO DIEKSEKUSI 29 FEBRUARI



Salah satu lorong jalan yang ada di tengah permukiman warga Kalijodo.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pembongkaran permukiman liar di kawasan Kalijodo pada akhir bulan ini. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah se usai melaksanakan rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo. "Persiapan sudah matang. Tanggal 29 Februari, eksekusi (penertiban kawasan Kalijodo)," kata Saefullah, di Balai Kota, Jumat(19/2/2016).

Pemprov DKI Jakarta menargetkan, pada tanggal itu, semua bangunan di kawasan Kalijodo akan rata dengan tanah, kecuali tempat ibadah yang berdiri di sana. "Nanti ada tim khusus untuk relokasi (tempat ibadah) ke mana dan bangunannya seperti apa," kata Saefullah. Adapun personel aparat keamanan yang diturunkan sekitar 4.000 anggota satpol PP dan 3.000 petugas kepolisian. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, Kalijodo merupakan tanah negara yang sudah diduduki secara liar oleh warga sejak puluhan tahun lalu. "Mereka memang boleh meningkatkan statusnya (lahan) dari tanah garapan ke HGB (hak guna bangunan). Namun, tidak ada permohonan seperti itu," ujar Saefullah. Pembongkaran kawasan Kalijodo dilakukan setelah surat peringatan dilayangkan tiga kali hingga dilanjutkan dengan surat perintah bongkar (SPB). "Rusun juga sudah siap, sampai tadi ada 403 unit yang kosong. Kami akan terus sisir di Rusunawa Marunda dan Rusunawa Pulogebang," kata Saefullah.

Penulis : Kurnia Sari Aziza

AHOK TAK HADIRI RAPAT KOORDINASI PENERTIBAN KALIJODO



Walikota Jakarta Barat Anas Effendi di Mapolda Metro Jaya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menghadiri rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksana, di Polda Metro Jaya, Senin (15/2/2016) ini.

"Enggak, enggak... Saya enggak ketemu Kapolda hari ini," kata Basuki, di Balai Kota. Basuki mengatakan, Tito akan memimpin rapat koordinasi tersebut. Tito, kata dia, akan mendengarkan pandangan dari seluruh pihak terkait. "Kapolda akan mendengarkan semuanya dari pihak RT/RW. Karena kasus ini berbeda dengan Dolly (kawasan lokalisasi di Surabaya)," kata Basuki. "Kemarin kami sudah ketemu sama Kapolda dan Pangdam Jaya, mereka akan atur. Mereka dengar masukan kami dan kalau sudah selesai, baru saya ketemu," kata Basuki. Hari ini, rapat koordinasi dilangsungkan di Mapolda Metro Jaya. Hingga pukul 11.00, baru Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang sudah hadir.

Penulis : Kurnia Sari Aziza

AHOK TERTAWA DENGAR AHMAD DHANI KE KALIJODO



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (pakai seragam coklat) bersama Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Verinica Tan (pakai baju putih) saat meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Puspita, Pesanggrahan, Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana musisi Ahmad Dhani mengunjungi kawasan Kalijodo, Senin (15/2/2016) ini. Basuki justru kembali menyinggung Nikita Mirzani yang lebih memilih dirinya ketimbang Ahmad Dhani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. "Enggak apa-apalah, Ahmad Dhani *mah* gampanglah. Yang penting Nikita dukung gue daripada dia, *gitu aja*. He-he-he," kata Basuki tertawa, di Balai Kota, Senin pagi.

Ia pun tak berencana mengikuti jejak suami Mulan Jameela untuk mengunjungi Kalijodo. "*Ngapain* saya ke Kalijodo? Lu mau nonton film kungfu?! He-he-he," kata Basuki. Ahmad Dhani sebelumnya berencana ke Kalijodo bersama GP Ansor. Mereka ingin mendengar aspirasi warga terkait penertiban. Rencananya, kawasan Kalijodo akan ditertibkan setelah penerbitan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar (SPB). Kalijodo akan diubah kembali fungsinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Penulis : Kurnia Sari Aziza

**AHOK, KAPOLDA METRO, DAN PANGDAM JAYA BAHAS PENERTIBAN
KALIJODO HARI INI**



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memimpin apel pengamanan bersama Kapolda Metro Jaya Iren Pol Tito Karnavian, Pangkostrad Letjen Edi Rahmayadi, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksamana, di Silang Selatan Monas, Jakarta.

Polda Metro Jaya bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Pangdam Jaya akan menggelar rapat koordinasi membahas penertiban lokasi prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara, Senin ini. "Ya (rapat koordinasi)," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/2/2016). Iqbal mengatakan, rapat koordinasi pembahasan Kalijodo itu akan digelar di Markas Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan menertibkan lokasi prostitusi Kalijodo karena termasuk kawasan hijau. Ahok menyebutkan akan menyediakan rumah susun (rusun) bagi warga Kalijodo yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan bahwa kepolisian akan mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan warga Kalijodo. Tito menuturkan, rapat koordinasi itu untuk membahas langkah yang akan diambil guna menertibkan kafe-kafe ilegal di Kalijodo.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

BEDA ANTARA KALIJODO DAN DOLLY MENURUT AHOK

Suasana di dalam salah satu kafe yang ada di Kalijodo, Jakarta Utara. Rata-rata kafe di Kalijodo menjajakan minuman bir dan perempuan pekerja seks komersial.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa kawasan Kalijodo berbeda dari lokasi prostitusi Dolly di Surabaya. Sebab, kawasan Dolly menjadi lokasi prostitusi resmi. "Kami kasusnya beda. (Kalijodo) ini kan memang jalur hijau yang diperjualbelikan," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016). "Anda enggak mungkin biarkan di depan hidung kamu, berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak *gitu* melanggar, *gimana* kita mau bereskan Waduk Pluit," kata Basuki lagi.

Basuki menjelaskan, kawasan lokasi prostitusi Dolly merupakan sebuah perkampungan yang ditempati oleh para pekerja seks komersial (PSK). Meski Dolly sudah ditutup, kata Basuki, praktik prostitusi masih banyak terjadi. Sementara itu, Kalijodo merupakan ruang hijau yang dibangun bangunan liar, kemudian disalahgunakan untuk praktik prostitusi, perjudian, serta penjualan minuman keras.

Penulis : Kurnia sari Aziza

INI SOLUSI AHOK UNTUK WARGA KALIJODO



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat memberikan sambutan dalam penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov DKI dengan Kemenkoinfo atas penyediaan layanan nomor panggilan tunggal darurat dan penyebarluasan SMS peringatan dini bencana Provinsi DKI Jakarta, di Balai Kota.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan sejumlah solusi bagi warga Kalijodo terkait rencana ditertibkannya wilayah tersebut. Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru. "Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).

Sementara itu, bagi warga Kalijodo yang ingin berdagang, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memberikan modal. Syaratnya, warga mendaftarkan diri ke Bank DKI serta membayarkan retribusi tiap harinya. "Untuk (warga Kalijodo) yang mau dagang, kami kasih ke (dinas) UMKM atau PD Pasar Jaya," kata Basuki.

Kemudian, bagi warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI, Pemprov DKI akan mengembalikan mereka ke kampung halaman masing-masing. Pemprov DKI Jakarta, kata Basuki, akan membiayai ongkos pulang kampung tersebut. "Pulang kampung saja sudah, kami yang *bayarin*," kata Basuki. Rencananya, kawasan Kalijodo akan ditertibkan bulan Februari ini. Kawasan marak prostitusi serta perjudian itu akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Kawasan Kalijodo akan ditertibkan setelah dilayangkan tiga kali surat peringatan hingga surat perintah bongkar (SPB).

Penulis : Kurnia Sari Aziza

KEBIASAAN "KERJA ENAK" DI KALIJODO



Tampak suasana di daerah Kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sepanjang jalan ini, banyak rumah-rumah kecil digunakan sebagai kafe dan tempat prostitusi.

"Daripada kerja di perusahaan, pergi pagi, pulang sore, jauh-jauh cuma dapat Rp 3,5 juta sebulan, enakan kerja di Kalijodo. Cuma jaga parkir tiap malam saja bisa dapat lebih banyak." Demikian penggalan obrolan antara petugas posko relokasi warga Kalijodo dan warga yang bertanya soal pelatihan kerja yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Dari pengalaman selama ini, rata-rata warga yang sudah dilatih dan disalurkan bekerja di perusahaan mitra dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta malah rindu ke pekerjaannya yang lama. Hal itu disebabkan warga yang bersangkutan sudah terbiasa "kerja enak", dengan arti tidak mengeluarkan terlalu banyak tenaga, tetapi dapat uang lebih besar. "Sering itu orang sudah bisa utak-atik mesin, sudah terampil, dikasih kerjaan di pabrik motor di Cikarang, enggak mau, katanya jauh, enggak jadi kerja jadinya," kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara Sutanto kepada *Kompas.com*, Selasa (23/2/2016) siang.

Sutanto juga sering menemui warga yang sebenarnya sudah mendapat lowongan kerja di sebuah tempat yang menjanjikan, tetapi menolaknya hanya karena dia harus bangun lebih awal untuk bekerja. "Katanya, capek, Pak. Saya kerja di hotel

harus bangun 06.30 WIB. Padahal, banyak orang yang bangunnya lebih pagi, pukul 05.00 WIB," tutur Sutanto.

Sebagai gambaran, hingga Selasa siang, warga Kalijodo yang daftar untuk ikut pelatihan dan keterampilan sebagai persiapan untuk bekerja hanya dua orang. Sebelumnya, ada beberapa warga lain yang ikut daftar, tetapi mereka malah membatalkan pendaftarannya itu. Petugas tidak mengerti apa yang membuat hanya sedikit warga mendaftar untuk ikut pelatihan.

Namun, bila dibandingkan dengan usaha warga di Kalijodo, penghasilannya memang bisa jadi lebih besar dari gaji karyawan maupun pegawai pada umumnya. Menurut Sutanto, perlu ada semacam revolusi mental untuk warga DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah menyediakan banyak jalur bagi pencari kerja. Mereka yang belum punya keahlian akan dilatih hingga satu bulan lebih, lalu dipastikan langsung dapat pekerjaan.

"Kalau mau enakya terus, ya susah," ujar Sutanto. Usaha di Kalijodo pada masa jayanya memang sangat menjanjikan. Pemilik bangunan dengan 25 kamar kos di Kalijodo, Nani (30), mengaku bisa dapat Rp 10 juta sebulan hanya dari usahanya menyewakan kamar kos. Sekarang, warga Kalijodo akan menjalani kehidupan baru, di tempat yang baru. Mereka juga akan membuat pilihan, apakah memilih berubah dan bekerja secara normal atau malah kembali membuka usaha tempat karaoke, menjual minuman keras, rumah bordil, perjudian, dan hal serupa di tempat lain.

Penulis : Andri Donnal Putera

MASJID TERAKHIR DI KALIJODO AKHIRNYA DIBONGKAR



Masjid Al Mubarakah di Kalijodo, wilayah Jakarta Barat.

Alat berat meruntukan sebuah masjid di kawasan Kalijodo, Selasa (1/3/2016). Masjid itu sempat dibiarkan berdiri dalam penertiban yang berlangsung kemarin. Sebelumnya ada dua masjid yang berada di kawasan yang akan dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) oleh Pemprov DKI Jakarta itu, yaitu Masjid Nurul Hasanah yang terletak di wilayah Jakarta Utara dan Masjid Al Mubarakah yang berada di Jakarta Barat. Masjid Nurul Hasanah telah dibongkar kemarin. Sebuah gereja juga telah diruntuhkan kemarin. Sebelum Masjid Al Mubarakah dibongkar, petugas menurunkan kubah masjid itu. Sebuah alat berat kemudian dikerahkan dan masjid itu pun akhirnya rata dengan tanah. Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi, menyaksikan pembongkaran itu. Anas mengatakan sebelum pembongkaran pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan pengurus masjid. "Sudah musyawarah pengurus dan pengelola masjid, sementara barang-barang ditaruh di pesantren daerah Jelambar, Jakarta Barat," kata Anas. Alasan pembongkaran menurut dia karena masjid itu berada di wilayah ruang terbuka hijau. "Akan kami bangun lagi nanti di wilayah barat masjid buat warga. Sementara di pesantren (daerah Jelambar) dulu," kata Anas.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya memastikan Masjid Al-Mubarakah akan dibangun kembali. Masjid tersebut akan disesuaikan dengan tampilan taman di Kalijodo. "Nanti kita akan bicarakan dengan marbutnya. Pasti dibongkar dulu. Kan enggak bisa tambal sulam," kata Djarot, Senin kemarin.

Penulis : Robertus Belarminus

PENAMBAHAN RTH TAK HARUS MEMBONGKAR WILAYAH BERPENGHUNI



Papan pengumuman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didirikan di atas reruntuhan Kalijodo, Jakarta Utara. Ke depan bekas lokasi dan tempat hiburan malam selama puluhan tahun itu akan menjadi ruang terbuka hijau, ruang publik ramah anak, jogging track, dan lapangan futsal.

Hingga Selasa (1/3/2016), proses pembersihan kawasan Kalijodo terus berlangsung. Pembongkaran dan penataan kawasan bekas prostitusi itu menjadi bagian dari rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota. Meski demikian, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Senin (29/2/2016) di Jakarta, mengatakan, pembongkaran wilayah berpenghuni bukanlah satu-satunya cara untuk menambah jumlah RTH di Jakarta.

RTH yang merupakan kewajiban dari pengembang, misalnya, masih banyak. Yayat menyebut totalnya bisa mencapai Rp 10 triliun. Itu berdasarkan dari surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang sudah diterbitkan sepanjang 1977-2016. Pengembang memiliki kewajiban menyediakan 20 persen lahan yang mereka bangun untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebagian pengembang pun masih nakal dan belum membayar utang tersebut. Pemerintah wajib menagih janji itu. "Pembangunan di sebuah kota harus dilakukan secara adil. Warga yang dibiarkan mendiami tanah negara jangan dicap berdosa. Pindahkanlah mereka secara manusiawi," kata Yayat.

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi, kemarin, menyampaikan, setelah bangunan hancur, lahan eks Kalijodo akan segera ditimbun dengan tanah. Selanjutnya dilakukan pembangunan taman dengan sejumlah fasilitas. "Kalijodo itu untuk ruang publik, menambah ruang hijau, dan menambah fasilitas taman. Kami juga tidak berhenti di Kalijodo, bangunan di kolong tol, pasar ikan, hingga sempadan sungai di Cilincing akan dikembalikan fungsinya," ucapnya.

Dari data pencitraan detail tata ruang Jakarta pada 2011, RTH di Jakarta Utara seluas 2.901,24 hektar. Jumlah ini terdiri dari ruang publik dan ruang privat. Luas itu masih jauh dari target RTH yang mencapai 5.438 hektar. Luas total Kalijodo sekitar empat hektar. Pengembalian kawasan Kalijodo menjadi zona hijau termasuk sebagian dari rencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot RTH.

Luas RTH publik Jakarta memang cenderung naik dari 9 persen menjadi 9,98 persen dalam 15 tahun terakhir. Namun, jumlah itu masih jauh lebih rendah dibandingkan amanat undang-undang tentang penataan ruang sebesar 20 persen. Selama ini, pembebasan lahan terkendala meski Pemprov DKI dinilai mampu dari sisi keuangan.

Tahun lalu, realisasi pengadaan lahan untuk RTH oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta tidak lebih dari 60 persen, terutama karena kendala administrasi tanah. Sepanjang 2015, dinas pertamanan membangun 10 taman seluas 49,33 hektar. Hingga akhir tahun lalu, luas RTH publik Jakarta mencapai 9,98 persen dari luas DKI Jakarta yang 661,52 kilometer persegi.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Gentur Wisnubaroto, ada 300 lokasi yang tahun lalu ditetapkan Pemprov DKI akan dikembalikan fungsinya ke RTH. Prosesnya melalui pembebasan lahan, tetapi sebagian besar di antaranya belum tuntas, antara lain terkait status kepemilikan tanah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan para wali kota di DKI untuk mengembalikan fungsi lahan. Lahan yang bersertifikat akan dibeli, sementara tanah negara yang diduduki akan diambil alih, sebagaimana lokasi lain yang telah dikosongkan selama ini, seperti Kalijodo dan pinggiran Waduk Pluit.

(DEA/JAL/MKN)

Artikel ini dimuat dalam Kompas Siang, edisi, Selasa 1 Maret 2016, dengan judul "Penambahan RTH Tak Harus Membongkar Wilayah Berpenghuni".

Editor : Icha Rastika

KALIJODO, LOKALISASI, DAN JALUR KERETA API



Tampak papan pengumuman dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didirikan di atas reruntuhan Kalijodo, Jakarta Utara. Ke depan bekas lokalisasi dan tempat hiburan malam selama puluhan tahun itu akan menjadi ruang terbuka hijau, ruang publik ramah anak, jogging track, dan lapangan futsal.

Seorang wartawan senior mengungkapkan, betapa lokalisasi tidak pernah berada terlalu jauh dari jalur atau stasiun kereta api. Pendapatnya tiba-tiba menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan. Benarkah demikian? Walau setelah ditelusuri, pendapatnya ternyata sungguh adalah sebuah kenyataan. Saritem, misalnya, adalah sebuah lokalisasi ternama di Kota Bandung. Saritem bahkan kerap diidentikkan dengan Bandung. Dan, laman-laman turis mancanegara terang-terangan menunjuk Saritem sebagai kawasan "lampu merah" di "Kota Kembang" itu. Berlokasi di antara Jalan Astana Anyar dan Jalan Gardu Jati, Saritem sungguh berlokasi tidak jauh dari Stasiun Kereta Bandung.

Bahkan, sejarah berdirinya Saritem tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembangunan kereta api oleh pemerintah kolonial Belanda di bumi Priangan. Boleh jadi, para pekerja seks komersial di Saritem juga didatangkan ke lokalisasi tersebut menggunakan rangkaian kereta api yang ketika itu sudah membentang dari Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung dan dari Bandung-Tasikmalaya-Ciamis hingga Yogyakarta.

Bicara soal Yogyakarta, ternyata lokalisasi ternama Pasar Kembang alias Sarkem juga tidak jauh dari Stasiun Tugu. Lokasinya tepat berada di sisi selatan dari jalur kereta api yang dibangun pada akhir abad ke-19 itu. Sebelum era 1970-an, lokalisasi di Yogyakarta bahkan lebih dikenal dengan nama Balokan. Nama Balokan ternyata berasal dari timbunan-timbunan balok rel yang disimpan di sisi selatan Stasiun Tugu tersebut. Aktivitas prostitusi di lokasi itu awalnya muncul karena kebutuhan para pekerja konstruksi jalur kereta api. Namun, lambat laun para pelancong yang tiba di Yogyakarta dengan kereta api membutuhkan tempat penginapan lengkap dengan "teman bermalam" sehingga kawasan Sarkem makin berkembang.

Pemerintah bukannya tidak tahu dengan kawasan Pasar Kembang. Arsip harian *Kompas* memperlihatkan bahwa pada Rabu (25/2/2004), Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sempat menyambangi permukiman Sarkem. "Saya datang ke tempat ini karena ditugaskan oleh Bapak Gubernur selaku anggota tim pemerintah untuk menangani masalah-masalah berperspektif jender, antara lain, ya, problem kesehatan masyarakat tidak mampu," kata GKR Hemas, ketika itu. Menurut GKR Hemas, penghapusan lokalisasi (tempat pelacuran) di wilayah Yogyakarta justru dikhawatirkan akan memicu tidak terkontrolnya kondisi kesehatan masyarakat Yogyakarta akibat penyakit menular.

Bongkaran

Bagaimana dengan di Jakarta? Warga Ibu Kota ternyata juga mengenal kawasan lokalisasi yang terkoneksi dengan jalur kereta api. Adalah kawasan Bongkaran yang seolah menjadi lokalisasi yang "terintegrasi" dengan Stasiun Tanah Abang. Lokasi pelacuran lain di Jakarta yang juga nyaris menempel dengan stasiun adalah Planet Senen yang kini tinggal cerita.

Tampaknya lokasi "remang-remang" itu erat dengan stasiun yang dulu identik pula dengan pusat kegiatan dan keramaian. Hingga dua dekade silam, pelanggan Bongkaran bahkan mengenal istilah "gubuk dorong", yakni bangunan semipermanen yang ditaruh di atas rel sehingga dapat dengan mudah dipindahkan. Di dalam bangunan "gubuk dorong" itulah aktivitas seksual dilakukan.

Namun, pada Agustus 2014 aktivitas di Bongkaran telah dihentikan. Bukan organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan yang meluluhlantakkan Bongkaran, melainkan pembongkaran dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Seusai penertiban oleh PT KAI, kini Bongkaran tinggal menjadi kisah di masa lalu. Riwayat Bongkaran kini sudah ditamatkan.

Jalur KRL Jabodetabek tidak lagi menjadi sarana penyuplai pelanggan ke Bongkaran. Kalijodo, yang pada beberapa hari belakangan dilanda penertiban, mungkin punya kisah berbeda. Berada tepat di tepian Kali Angke, dahulu kawasan tersebut dijangkau dengan naik perahu.

Tradisi Tionghoa, Peh Cun, pula yang makin menyemarakkan kawasan itu menjadi kawasan perjodohan. Walau entah bagaimana dari kawasan yang oleh mudamudi sekaligus dimanfaatkan untuk mencari jodoh, kawasan itu berubah fungsi menjadi kawasan cari jodoh dalam "hitungan jam". Akan tetapi, kita paham bahwa kini tidak ada satu kapal pun yang berlayar di Kali Angke. Jadi, dari mana para pelanggan Kalijodo? Dapat saja dari pusat-pusat aktivitas bisnis dari sekitar kawasan tersebut. Namun, setelah diamat-amati, ternyata Stasiun Angke berjarak tidak sampai satu kilometer dari Kalijodo.

(HARYO DAMARDONO).

Arttikel ini dimuat dalam Kompas Siang, edisi Selasa 1 Maret 2016, dengan judul "Kalijodo, Lokalisasi, dan Jalur Kereta Api"

KAMPUNG PULO, KALIJODO, DAN TARGET AHOK SELANJUTNYA

Selama pemerintahannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjanji bakal membongkar seluruh bangunan liar yang berdiri di lahan negara. Mulai dari pemukiman di bantaran kali, di atas saluran air, hingga yang berdiri di atas ruang terbuka hijau (RTH). Masih terbayang di benak, bagaimana Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Satpol PP DKI Jakarta membongkar sejumlah pemukiman liar di Kampung Pulo di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, 20 Agustus 2015 lalu. Kawasan itu menjadi kawasan langganan banjir. Namun, setiap kepala daerah menemui kesulitan ketika akan menertibkan bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung itu.

Seperti yang diucapkan oleh Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu. "Sudah lima gubernur, enggak ada yang jadi bongkar. Mereka juga jadi bodo amat, akhirnya bangun rumah lagi. Baru Pak Ahok (Basuki) nih yang akhirnya berani membuat keputusan itu. Kata Bapak, 'bereskan'," ujar Bambang ketika itu.

Tak sedikit penolakan serta kecaman yang disampaikan beberapa pihak kepada Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski penertiban berakhir ricuh, namun sekitar 920 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Cara yang ditempuh Basuki pun terbilang berbeda dengan gubernur sebelumnya, Joko Widodo. Tak ada komunikasi dan makan siang seperti yang dilakukan Jokowi. Basuki lebih memilih menggunakan ancaman pemecatan bagi anak buahnya yang tak mau mengikuti instruksinya.

Pada akhirnya, sebagian bangunan liar di bantaran Kali Ciliwung telah rata dengan tanah. Langkah pertama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta setelah itu adalah pembangunan *sheet pile* atau dinding turap di sisi Kali Ciliwung. "Target saya tahun ini cuma Kampung Pulo tidak banjir," kata Basuki. Meskipun belum benar-benar bebas banjir, namun banjir di Kampung Pulo mulai dapat teratasi.

Jalan Jatinegara Barat dan Terminal Kampung Melayu yang biasanya terendam banjir, kini tidak lagi demikian. Sejak dibangun tanggul, banjir di Kampung Pulo yang biasanya terjadi setelah hujan itu bisa dicegah. "Hanya air di got-nya saja yang naik sekitar 10 sentimeter gara-gara hujan, cuma enggak sampai banjir. Air tidak sampai masuk ke rumah," kata Daringin, seorang warga Kampung Pulo beberapa waktu lalu.

Giliran Kalijodo

Tak hanya Kampung Pulo, Basuki mulanya diragukan mampu menertibkan kawasan Kalijodo. Kawasan yang sedianya menjadi ruang terbuka hijau (RTH) itu disalahgunakan. Ratusan bangunan liar berdiri di Kalijodo. Sebagiannya adalah kafe tempat hiburan malam yang juga menawarkan pekerja seks komersial (PSK). Namun kini, bangunan yang berdiri di Kalijodo, telah rata dengan tanah. Pada Senin (29/2/2016), Pemprov DKI melakukan penertiban bangunan dengan dikawal TNI dan polisi.

Menurut Basuki, penertiban Kalijodo sebenarnya sudah direncanakan sejak 2014. Rencana itu sempat tertunda hingga akhirnya Basuki menegaskan instruksinya untuk menggusur bangunan di Kalijodo setelah kecelakaan Fortuner beberapa waktu lalu. Pengemudi Fortuner yang menewaskan empat orang itu mengaku mabuk setelah pulang dari kawasan hiburan malam Kalijodo.

Proses penertiban kawasan Kalijodo pun terbilang cepat. Pasalnya, pelayanan surat sosialisasi, tiga kali surat peringatan, hingga surat perintah bongkar (SPB) hanya memerlukan waktu sekitar 20 hari. Lagi-lagi, Basuki tak melakukan komunikasi dengan warga setempat. Ia hanya mengancam akan memecat Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara jika tak berani menertibkan kawasan itu.

Rencana penertiban Kalijodo itu dihadang oleh sejumlah warga serta tokoh masyarakat Abdul Azis atau Daeng Azis. Kenyamanan puluh tahun yang mereka rasakan harus diusik oleh rencana Basuki. Berbagai cara dilakukan Azis dan kroninya untuk menggagalkan rencana Pemprov DKI Jakarta menertibkan Kalijodo. Mulai dari mengadu ke Komnas HAM hingga ke DPRD DKI Jakarta. Hanya saja, gerak polisi lebih cepat.

Azis ditetapkan sebagai tersangka penjualan pekerja seks komersial (PSK) di kafe-kafenya di Kalijodo. Bahkan, tiga hari sebelum penertiban, Azis ditangkap polisi atas dugaan pencurian listrik di kafe miliknya, di Kafe Intan.

Lambat laun, warga menerima rencana relokasi ke rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Penertiban bangunan liar di Kalijodo pun berlangsung lancar. Hal ini berbeda dengan prediksi sebelumnya yang menyebut akan adanya perlawanan yang dilakukan warga. Berbagai ancaman seperti aksi telanjang 1000 PSK pun tidak terbukti.

Dibangun taman

Rencananya, kawasan Kalijodo akan dibangun taman berkonsep ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Lengkap dengan fasilitas masjid, *jogging track*, lapangan bola, lapangan futsal, ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, dan lain-lain. "Kami sudah punya desain tamannya dan sebulan ini saya rapihin kondisinya. Kami paling 5-6 bulan kerja dan sudah jadi tamannya. Tamannya akan tetap diberi nama Taman Kalijodo," kata Basuki. Taman itu akan dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Pembiayaannya pun tidak melalui APBD DKI, namun kembali melalui kewajiban pengembang.

Target penertiban selanjutnya

Tak jauh dari kawasan Kalijodo, berdiri pemukiman liar di kolong tol Pluit, Pejagalan, Jakarta Utara. Terkait bangunan liar di kolong tol ini, Basuki telah meminta untuk digusur pada Selasa (1/3/2016) kemarin, tanpa perlu surat sosialisasi dan surat peringatan.

Pemerintah mengultimatum warga untuk angkat kaki dari kolong tol Pluit dalam waktu 1x24 jam sejak Senin (29/2/2016). Warga pun sudah berduyun-duyun mengemasi barangnya dan pindah ke tempat lain. Bangunan yang berdiri di sana kebanyakan adalah gubuk semipermanen yang dihuni para pendatang. "Kolong tol Pluit itu sudah beberapa kali dibebaskan, tapi warga balik ke sana lagi. Makanya ngapain kita sopan-sopan sama warga baru? Kasih surat peringatan tuh sopan-sopannya kita aja buat warga yang sudah lama tinggal di sana," kata Basuki.

Rencananya, kolong tol Pluit akan dibangun RTH atau lahan parkir setelah penertiban. Selain kolong Tol Pluit, Basuki berencana menertibkan sebagian lahan Berlan, Jakarta Timur. Yang pasti, kata Basuki, Pemprov DKI Jakarta akan mengambil paksa seluruh RTH yang diduduki bangunan liar. Basuki pun berjanji akan menggusur lebih banyak pemukiman liar jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tak mengkhawatirkan persepsi buruk masyarakat yang mungkin timbul terkait penggusuran yang dilakukan menjelang Pilkada DKI 2017 tersebut. "Mereka tanya saya, 'Bapak akan gusur lebih banyak lagi enggak? Karena ini kan jelang pilkada.' Saya bilang, 'Saya akan gusur lebih banyak tahun ini sampai tahun depan,'" kata Basuki.

Penulis : Kurnia Sari Aziza

**KAPOLDA BANTAH PEMBANGUNAN LAHAN PARKIR UCAPAN
TERIMA KASIH AHOK TERKAIT KALIJODO**



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian saat melakukan groundbreaking pembangunan lapangan parker Mapolda Metro Jaya.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian membantah pembangunan lahan parkir merupakan bentuk terima kasih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihaknya yang telah membantu menertibkan kawasan Kalijodo. Menurut Tito, pembangunan lapangan parkir di Mapolda Metro Jaya sudah direncanakan sejak 3 bulan yang lalu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Tidak ada hubungannya dengan Kalijodo," ujarnya saat melakukan *groundbreaking* pembangunan lapangan parkir Mapolda Metro Jaya, Rabu (2/3/2016). Ia pun mengapresiasi pembangunan lapangan parkir yang dimulai cepat. Dia berharap pembangunan parkir tersebut menjadi simbol kepedulian Pemprov DKI kepada Polda Metro Jaya. "Semoga menjadi agen perubahan wajah Jakarta lebih baik," ucapnya.

Tito mengatakan, pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari Polri untuk merenovasi dan membangun infrastruktur. Mengingat, anggaran dari Polri sangat terbatas. Lapangan parkir ini dibangun di atas lahan seluas 30.526 meter persegi. Lapangan itu dibiayai melalui kewajiban pengembang reklamasi. Adapun pembangunan dilakukan oleh PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Group). Basuki Tjahaja Purnama menyebut anggaran lapangan parkir mencapai Rp 70 miliar. Pembangunan diperkirakan rampung dalam waktu satu tahun.

Penulis : Akhdi Martin Pratama

LURAH USULKAN PENGHAPUSAN RW 05 KALIJODO

Lurah Pejagalan, Maskur mengatakan, wilayah RW 05 Kelurahan Pejagalan diusulkan dihapus. Hal ini berkaitan dengan kosongnya lima RT di kawasan Kalijodo tersebut. Menurut Maskur, mulanya ada sembilan RT di wilayah RW 05.

Namun, RT 01, 03, 04, 05 dan 06 telah kosong setelah penggusuran sehingga hanya tersisa empat RT, yakni RT 02, 07, 08 dan 09. “Kalau hanya empat RT dalam satu RW terlalu sedikit. Untuk itu, karena saat ini lima RT tersebut sudah tidak ada warga, saya akan usulkan agar keberadaan RW 05 dihapus,” ujar Maskur, Rabu (2/3/2016). Untuk empat RT yang tersisa saat ini, akan diusulkan dimasukkan ke RW 03 dan 04 yang memang wilayahnya juga dekat dengan dua RW tersebut. “Untuk itu saat ini saya sedang mengusahakan untuk mengusulkan pada Wali Kota agar keberadaan RW 05 dihapus,” ujar dia.

Editor : Icha Rastika

SEDERET KASUS YANG MEMBELIT DAENG AZIS



Tersangka pencuri listrik, Abdul Azis atau Daeng Azis di Mapolres Metro Jakarta Utara.

Satu demi satu, kasus yang menyeret nama pentolan Kalijodo Abdul Azis alias Daeng Azis mulai terkuak. Ini diawali dari penetapan Azis sebagai tersangka dalam kasus prostitusi atau perdagangan wanita beberapa waktu silam. Saat ditetapkan sebagai tersangka prostitusi, Azis masih bebas tanpa harus mendekam di balik jeruji besi. Terkait kasus ini, Polda Metro Jaya memanggil Azis untuk diperiksa pada Rabu pekan lalu. Namun, hari itu Azis tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Kuasa hukumnya, yakni Razman Arif Nasution menyampaikan bahwa Azis tak memenuhi panggilan pemeriksaan polisi karena ada urusan keluarga di Serang, Banten. Dua hari kemudian, Azis kembali tak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi.

Ditangkap

Hari itu pula, Azis ditangkap tim Polres Metro Jakarta Utara. Namun, penangkapan Azis bukan terkait kasus prostitusi yang menjeratnya, melainkan kasus dugaan pencurian listrik. Dia diduga membuat sambungan listrik ilegal untuk kafe miliknya di Kalijodo, yakni Kafe Intan. Azis diduga menyambung hingga empat aliran listrik secara tidak resmi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, dugaan ini dibantah Razman. Menurut Razman, kliennya itu telah membayar Rp 17 juta kepada PLN untuk mengalirkan listrik ke kafanya. Kini, Kafe Intan dan bangunan lainnya di Kalijodo telah dirobohkan.

Pada Senin (29/2/2016), Pemprov DKI Jakarta mengerahkan eskavator-eskavator untuk mengancurkan bangunan liar di sana. Kalijodo akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau setelah ini.

Dugaan pencurian air

Saat penertiban berlangsung, ditemukan dugaan pencurian air yang dilakukan Daeng Azis. Indikasi ini akan diselidiki tim Polda Metro Jaya. Dugaan pencurian air ini diperkuat dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh petugas PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) di Kalijodo.

Kepala Divisi Customer Service PT Palyja Asep Rahmat menyatakan bahwa dari 500 sambungan air di Kalijodo, 400 di antaranya berstatus ilegal. Tak hanya itu, saat polisi menggelar Operasi Pekat pada 20 Februari lalu, ditemukan sejumlah senjata tajam di Kafe Intan milik Azis. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti sebelumnya memastikan bahwa para pemilik senjata tajam itu akan diproses hukum. Terkait kepemilikan senjata tajam ini, pengacara Azis membantahnya. Razman mengatakan bahwa kliennya tidak pernah menyimpan senjata tajam di kafanya. Menurut dia, mustahil Azis menyimpan senjata tajam di dalam kafanya saat sudah tahu polisi akan menggelar razia.

Penulis : Dian Ardiahanni

PUING DARI KALIJODO DIJADIKAN FONDASI TAMAN



Warga beralan saat eksekusi pembongkaran bangunan di Kalijodo, Jakarta. Kawasan yang kerap dikenal sebagai tempat hiburan malam itu akan menadi ruang terbuka hijau.

Puing-puing bangunan di Kalijodo dikumpulkan petugas Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Petugas juga membersihkan dan memungut sampah yang berada di Kalijodo pasca penertiban. Beberapa unit mobil truk sudah disiapkan guna mengangkut sampah serta membereskan puing-puing. Alat berat juga masih terlihat merapikan sisa-sisa bangunan yang dibongkar. "Puing-puing bangunan ini dikumpulkan, nantinya dijadikan fondasi pembangunan taman," ujar seorang petugas PPSU di Kalijodo, Rabu (2/3/2016). Ia menambahkan, untuk sampah-sampah yang berceceran segera dibuang ke kawasan Bantar Gebang. "Sampah-sampah seperti plastik, kayu, asbes, dan perabotan rumah tangga yang tidak terpakai langsung dinaikan ke truk untuk dibuang," ucapnya.

Para pemulung pun turut serta meramaikan kawasan Kalijodo ini. Mereka memanfaatkan situasi guna mengais rejeki dengan mengumpulkan besi-besi untuk dijual. Meski kawasan Kalijodo sudah dipasang garis polisi, para pemulung tetap nekat merangsek masuk mengorek sisa-sisa bongkaran. Sedangkan para pengendara yang melintas masih saja berduyun-duyun menonton Kalijodo yang sudah rata dengan tanah itu. Mereka berhenti sejenak dengan mengabadikan melalui ponselnya memotret lokasi yang tersohor dengan praktek prostitusinya ini. "Masuk TV, lihat aja sekalian foto-foto," kata Ina (32) pengemudi yang melintas di sekitar kawasan Kalijodo. (**Andika Panduwinata**)

TAK ADA EKS PSK KALIJODO YANG DAFTAR UNTUK IKUT BINAAN

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut tidak ada eks pekerja seks komersial (PSK) Kalijodo yang mendaftar untuk mendapat pembinaan. Panti sosial yang siap menampung para mantan PSK Kalijodo adalah Panti Sosial Bina Karya Wanita milik Dinas Sosial dan Panti Sosial Binakarya milik Kementerian Sosial di Pasar Rebo, Jakarta Timur. "Mereka enggak ada yang mau daftar. Dia juga mungkin malu kali ya, siapa sih yang mau *ngaku* PSK," kata Basuki atau Ahok di Balai Kota, Rabu (2/3/2016).

Namun Ahok mengaku senang karena warga sudah bersedia pindah ke rumah susun. Ia menjanjikan pemberian jaminan pendidikan bagi anak-anak korban terdampak penertiban. Tak hanya itu, Ahok juga menjanjikan pemberian gerobak untuk berusaha. "Nanti Kalijodo akan jadi taman luas dan orang-orang butuh makan. Jadi orang di sana bisa jualan lagi," kata Ahok. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan, mengatakan, belum ada PSK yang mendaftar untuk dibina. Padahal, instansinya telah membuka posko pembinaan di Kalijodo. "Belum ada PSK yang mendaftar pada petugas di posko Kalijodo. Belum dapat diinformasikan PSK yang akan direhabilitasi dan dibina lebih lanjut," kata Masrokhan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah bekerjasama dengan Kementerian Sosial dalam rangka memberi bantuan modal usaha bagi para mantan PSK. Modal usaha yang akan diberikan sebesar Rp 5 juta.

Penulis : Kurnia Sari Aziza

LAMPIRAN C. INSTRUMEN PEMANDU PENGUMPUL DATA

C. 1 Tabel Pemandu Pengumpul Data Strategi Retoris pada Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data Strategi Retoris	Sumber Data	Kode
1.	Kalijodo Dieksekusi 29 Februari	Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pembongkaran permukiman liar di kawasan kalijodo pada akhir bulan ini. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah seusai melaksanakan rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo. "Persiapan sudah matang. Tanggal 29 Februari, eksekusi (penertiban kawasan Kalijodo)," kata Saefullah, di Balai Kota, Jumat (19/2/2016	Teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas edisi jumat, 19 Februari 2016.	Sret 1

2.	Ahok, Kapolda Metro, Dan Pangdam Jaya Bahas Penertiban Kalijodo Hari Ini	Polda Metro Jaya bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Pangdam Jaya akan menggelar rapat koordinasi membahas penertiban lokasi prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara, senin ini. Ya (rapat koordinasi)," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisariss Besar Mohammad Iqbal saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/2/2016). Iqbal mengatakan, rapat koordinasi pembahasan Kalijodo itu akan digelar di Markas Polda Metro Jaya.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Sret 2
3.	Beda antara Kalijodo dan Dolly Menurut Ahok	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa kawasan Kalijodo berbeda dari lokasi prostitusi Dolly di Surabaya. Sebab, kawasan Dolly menjadi lokasi prostitusi resmi. "Kami kasusnya beda. (Kalijodo) ini kan memang jalur hijau yang diperjualbelikan," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016). "Anda enggak mungkin biarkan	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Sret 3

		di depan hidung kamu, berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak gitu melanggar, gimana kita mau bereskan Waduk Peluit,” kata Basuki lagi.		
4.	Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo	Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru. Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru. "Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Sret 4
5.	Penambahan RTH Tak Harus Membongkar Berpenghuni Wilayah	RTH yang merupakan kewajiban dari pengembang, misalnya, masih banyak. Yayasan menyebut totalnya bisa mencapai Rp 10 triliun. Itu berdasarkan dari surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang sudah diterbitkan sepanjang 1977-2016. Pengembang memiliki kewajiban menyediakan 20 persen lahan	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi selasa, 1 Maret 2016.	Sret 5

		<p>yang mereka bangun untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebagai pengembang pun masih nakal dan belum membayar utang tersebut. Pemerintah wajib menagih janji itu. “Pembangunan di sebuah kota harus dilakukan secara adil. Warga yang mendiami tanah negara jangan dicap berdosa. Pindahkanlah mereka secara manusiawi,” kata Yayasan.</p>		
		<p>Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan para wali kota di DKI untuk mengembalikan fungsi lahan. Lahan yang bersertifikat akan dibeli, sementara tanah negara yang diduduki akan diambil alih, sebagaimana lokasi lain yang telah dikosongkan selama ini, seperti Kalijodo dan pinggiran Waduk Pluit.</p>	<p>Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi Selasa, 1 Maret 2016.</p>	<p>Sret 6</p>
<p>6.</p>	<p>Kalijodo, Lokalisasi, dan Jalur Kereta Api</p>	<p>Tradisi Tionghoa, Peh Cun, pula yang makin menyemarakkan kawasan itu menjadi kawasan perjodohan. Walau entah</p>	<p>Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi Rabu, 2 Maret 2016.</p>	<p>Sret 7</p>

		<p>bagaimana dari kawasan yang oleh muda-mudi sekaligus dimanfaatkan untuk mencari jodoh, kawasan itu berubah fungsi menjadi kawasan cari jodoh dalam "hitungan jam". Akan tetapi, kita paham bahwa kini tidak ada satu kapal pun yang berlayar di Kali Angke. Jadi, dari mana para pelanggan Kalijodo? Dapat saja dari pusat-pusat aktivitas bisnis dari sekitar kawasan tersebut. Namun, setelah diamat-amati, ternyata Stasiun Angke berjarak tidak sampai satu kilometer dari Kalijodo.</p>	
--	--	---	--

7.	Kampung Pulo, Kalijodo, dan Target Ahok Selanjutnya.	Tak sedikit penolakan serta kecaman yang disampaikan beberapa pihak kepada Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski penertiban berakhir ricuh, namun sekitar 920 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Cara yang ditempuh Basuki pun terbilang berbeda dengan gubernur sebelumnya, Joko Widodo. Tak ada komunikasi dan makan siang seperti yang dilakukan Jokowi. Basuki lebih memilih menggunakan ancaman pemecatan bagi anak buahnya yang tak mau mengikuti instruksinya.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.	Sret 8
----	---	--	---	--------

8.	Lurah Usulkan Penghapusan RW 05 Kalijodo	Namun, RT 01, 03, 04, 05 dan 06 telah kosong setelah penggusuran sehingga hanya tersisa empat RT, yakni RT 02, 07, 08 dan 09. “Kalau hanya empat RT dalam satu RW terlalu sedikit. Untuk itu, karena saat ini lima RT tersebut sudah tidak ada warga, saya akan usulkan agar keberadaan RW 05 dihapus ,” ujar Maskur, Rabu (2/3/2106). Untuk empat RT yang tersisa saat ini, akan diusulkan dimasukkan ke RW 03 dan 04 yang memang wilayahnya juga dekat dengan dua RW tersebut. “Untuk itu saat ini saya sedang mengusahakan untuk mengusulkan pada Wali Kota agar keberadaan RW 05 dihapus,” ujar dia.	Teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.	Sret 9
----	---	---	--	--------

C.2 Tabel Pemandu Pengumpul Data Konteks Sosial pada Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas

C.2.1 Konteks Sosial Politik

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data Konteks Sosial	Sumber Data	Kode
1.	Ahok Tertawa Dengar Ahmad Dhani Ke Kalijodo	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana musisi Ahmad Dhani mengunjungi kawasan Kalijodo, Senin (15/2/2016) ini. Basuki justru kembali menyinggung Nikita Mirzani yang lebih memilih dirinya ketimbang Ahmad Dhani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. "Enggak apa-apalah, Ahmad Dhani mah gampanglah. Yang penting Nikita dukung gue daripada dia, gitu aja. He-he-he, " kata Basuki tertawa, di Balai Kota, Senin pagi.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Kpol 1
2.	Kampung Pulo, Kalijodo, dan Target Ahok Selanjutnya.	Seperti yang diucapkan oleh Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu. " Sudah lima gubernur, enggak ada yang jadi bongkar. Mereka juga jadi	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.	Kpol 2

	<p>bodo amat, akhirnya bangun rumah lagi. Baru Pak Ahok (Basuki) nih yang akhirnya berani membuat keputusan itu. Kata Bapak, 'bereskan',' ujar Bambang ketika itu.</p>		
	<p>Tak sedikit penolakan serta kecaman yang disampaikan beberapa pihak kepada Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski penertiban berakhir ricuh, namun sekitar 920 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Cara yang ditempuh Basuki pun terbilang berbeda dengan gubernur sebelumnya, Joko Widodo. Tak ada komunikasi dan makan siang seperti yang dilakukan Jokowi. Basuki lebih memilih menggunakan ancaman pemecatan bagi anak buahnya yang tak mau mengikuti instruksinya.</p>	<p>Teks berita kasus Kaliendo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.</p>	<p>Kpol 3</p>

C.2.2 Konteks Sosial Ekonomi

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data Konteks Sosial	Sumber Data	Kode
1.	Kapolda Bantah Pembangunan Lahan Parkir Ucapan Terima Kasih Ahok Terkait Kalijodo	Tito mengatakan, pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari Polri untuk merenovasi dan membangun infrastruktur. Mengingat, anggaran dari Polri sangat terbatas. Lapangan parkir ini dibangun di atas lahan seluas 30.526 meter persegi. Lapangan itu dibiayai melalui kewajiban pengembang reklamasi. Adapun pembangunan dilakukan oleh PT Jaladri Kartika Paksi (Agung Podomoro Group). Basuki Tjahaja Purnama menyebut anggaran lapangan parkir mencapai Rp 70 miliar. Pembangunan diperkirakan rampung dalam waktu satu tahun.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.	Keko 1
2.	Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo	Sementara itu, bagi warga Kalijodo yang ingin berdagang, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memberikan modal. Syaratnya, warga mendaftarkan diri ke Bank DKI serta	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Keko 2

		membayarkan retribusi tiap harinya. "Untuk (warga Kalijodo) yang mau dagang, kami kasih ke (dinas) UMKM atau PD Pasar Jaya," kata Basuki.		
3.	Kebiasaan "Kerja Enak" di Kalijodo	"Daripada kerja di perusahaan, pergi pagi, pulang sore, jauh-jauh cuma dapat Rp 3,5 juta sebulan, enakan kerja di Kalijodo. Cuma jaga parkir tiap malam saja bisa dapat lebih banyak. " Demikian penggalan obrolan antara petugas posko relokasi warga Kalijodo dan warga yang bertanya soal pelatihan kerja yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 24 Februari 2016.	Keko 3

C.2.3 Konteks Sosial Hukum

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data Konteks Sosial	Sumber Data	Kode
1.	Beda Antara Kalijodo dan Dolly Menurut Ahok	Basuki menjelaskan, kawasan lokasi prostitusi Dolly merupakan sebuah perkampungan yang ditempati oleh para pekerja seks komersial (PSK). Meski Dolly sudah ditutup, kata Basuki, praktik prostitusi masih banyak terjadi. Sementara itu, Kalijodo merupakan ruang hijau yang dibangun bangunan liar, kemudian disalahgunakan untuk praktik prostitusi, perjudian, serta penjualan minuman keras.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Khuk 1
2.	Sederet Kasus yang Membelit Daeng Azis	Hari itu pula, Azis ditangkap tim Polres Metro Jakarta Utara. Namun, penangkapan Azis bukan terkait kasus prostitusi yang menjeratnya, melainkan kasus dugaan pencurian listrik. Dia diduga	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.	Khuk 2

		<p>membuat sambungan listrik ilegal untuk kafe miliknya di Kalijodo, yakni Kafe Intan. Azis diduga menyambung hingga empat aliran listrik secara tidak resmi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, dugaan ini dibantah Razman. Menurut Razman, kliennya itu telah membayar Rp 17 juta kepada PLN untuk mengalirkan listrik ke kafanya. Kini, Kafe Intan dan bangunan lainnya di Kalijodo telah dirobohkan.</p> <p>Pada Senin (29/2/2016), Pemprov DKI Jakarta mengerahkan eskavator-eskavator untuk mengancurkan bangunan liar di sana. Kalijodo akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau setelah ini.</p>		
3.	<p>Ahok, Kapolda Metro, Dan Pangdam Jaya Bahas Penertiban Kalijodo Hari Ini</p>	<p>Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan menertibkan lokasi prostitusi Kalijodo karena termasuk kawasan hijau. Ahok menyebutkan akan menyediakan</p>	<p>Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.</p>	<p>Khuk 3</p>

		rumah susun (rusun) bagi warga Kalijodo yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan bahwa kepolisian akan mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan warga Kalijodo. Tito menuturkan, rapat koordinasi itu untuk membahas langkah yang akan diambil guna menertibkan kafe-kafe ilegal di Kalijodo.		
--	--	---	--	--

C.2.4 Konteks Sosial Budaya

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data Konteks Sosial	Sumber Data	Kode
1.	Ahok Tak Hadiri Rapat Koordinasi Penertiban Kalijodo	"Enggak, enggak... Saya enggak ketemu Kapolda hari ini," kata Basuki, di Balai Kota. Basuki mengatakan, Tito akan memimpin rapat koordinasi tersebut. Tito, kata dia, akan mendengarkan pandangan dari seluruh pihak	Teks berita kasus Kalijodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Kbud 1

		<p>terkait. "Kapolda akan mendengarkan semuanya dari pihak RT/RW. Karena kasus ini berbeda dengan Dolly (kawasan lokalisasi di Surabaya)," kata Basuki. "Kemarin kami sudah ketemu sama Kapolda dan Pangdam Jaya, mereka akan atur. Mereka dengar masukan kami dan kalau sudah selesai, baru saya ketemu," kata Basuki. Hari ini, rapat koordinasi dilangsungkan di Mapolda Metro Jaya. Hingga pukul 11.00, baru Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang sudah hadir.</p>	
2.	<p>Kalijodo, Lokalisasi, dan Jalur Kereta Api</p>	<p>Bagaimana dengan di Jakarta? Warga Ibu Kota ternyata juga mengenal kawasan lokalisasi yang terkoneksi dengan jalur kereta api. Adalah kawasan Bongkaran yang seolah menjadi lokalisasi yang "terintegrasi" dengan Stasiun Tanah Abang. Lokasi pelacuran lain di Jakarta yang juga nyaris menempel dengan stasiun adalah Planet Senen yang kini</p>	<p>Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.</p> <p>Kbud 2</p>

	tinggal cerita.		
	<p>Tradisi Tionghoa, Peh Cun, pula yang makin menyemarakkan kawasan itu menjadi kawasan perjodohan. Walau entah bagaimana dari kawasan yang oleh muda-mudi sekaligus dimanfaatkan untuk mencari jodoh, kawasan itu berubah fungsi menjadi kawasan cari jodoh dalam "hitungan jam". Akan tetapi, kita paham bahwa kini tidak ada satu kapal pun yang berlayar di Kali Angke. Jadi, dari mana para pelanggan Kalijodo? Dapat saja dari pusat-pusat aktivitas bisnis dari sekitar kawasan tersebut. Namun, setelah diamat-amati, ternyata Stasiun Angke berjarak tidak sampai satu kilometer dari Kalijodo.</p>	<p>Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.</p>	<p>Kbud 3</p>

C.3 Tabel Pemandu Pengumpul Data Ideologi pada Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas

C.3.1 Ideologi Pancasila

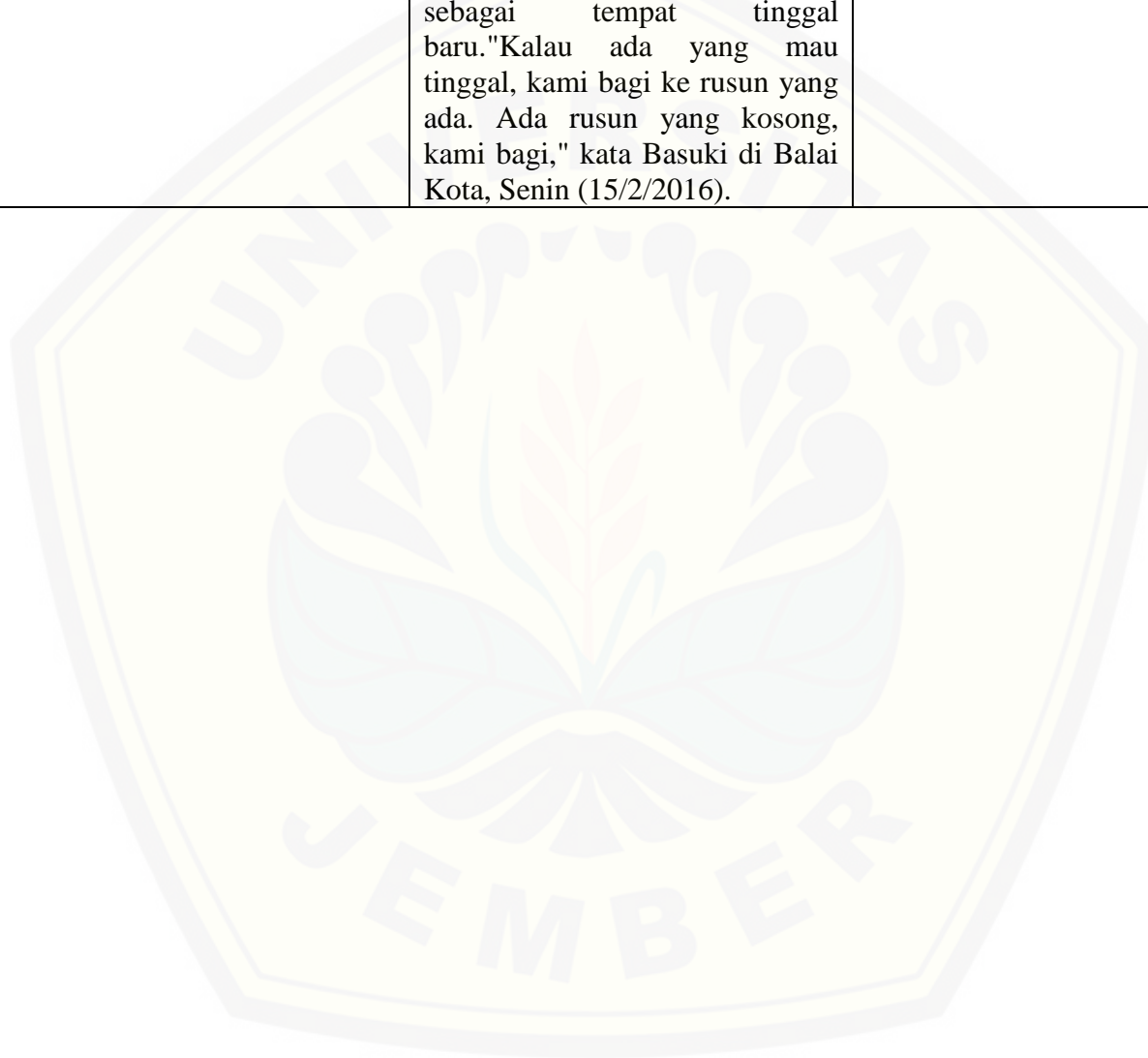
No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data Ideologi	Sumber Data	Kode
1.	Beda Antara Kalijodo dan Dolly Menurut Ahok	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa kawasan Kalijodo berbeda dari lokasi prostitusi Dolly di Surabaya. Sebab, kawasan Dolly menjadi lokasi prostitusi resmi. "Kami kasusnya beda. (Kalijodo) ini kan memang jalur hijau yang diperjualbelikan," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016). “Anda enggak mungkin biarkan di depan hidung kamu, berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak gitu melanggar, gimana kita mau bereskan Waduk Peluit,” kata Basuki lagi.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Idep 1
2.	Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan sejumlah solusi bagi warga Kalijodo terkait rencana ditertibkannya wilayah tersebut. Bagi warga yang	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi selasa, 15 Februari 2016.	Idep 2

		memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru."Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).		
3.	Masjid Terakhir di Kalijodo Akhirnya Dibongkar	Sebelum masjid Al Mubarrokah dibongkar, petugas menurunkan kubah masjid itu. Sebuah alat berat kemudian dikerahkan dan masjid itu pun akhirnya rata dengan tanah. Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi, menyaksikan pembongkaran itu. Anas mengatakan sebelum pembongkaran pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan pengurus masjid.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi selasa, 1 Maret 2016	Idep 3

C.3.2 Ideologi Politik

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data Ideologi	Sumber Data	Kode
1.	Ahok Tertawa Dengar Ahmad Dhani Ke Kalijodo	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana musisi Ahmad Dhani mengunjungi kawasan Kalijodo, Senin (15/2/2016) ini. Basuki justru kembali menyinggung Nikita Mirzani yang lebih memilih dirinya ketimbang Ahmad Dhani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. "Enggak apa-apalah, Ahmad Dhani mah gampanglah. Yang penting Nikita dukung gue daripada dia, gitu aja. He-he-he," kata Basuki tertawa, di Balai Kota, Senin pagi.	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi senin, 15 Februari 2016.	Idepol 1
2.	Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan sejumlah solusi bagi warga Kalijodo terkait rencana ditertibkannya wilayah tersebut. Bagi warga	Teks berita kasus Kaliodo di laman Kompas edisi rabu, 2 Maret 2016.	Idepol 2

		yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru."Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).		
--	--	--	--	--



D. INSTRUMEN PEMANDU ANALISIS DATA

D.1 Tabel Pemandu Analisis Data Strategi Retoris pada Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1.	Kalijodo Dieksekusi 29 Februari	Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pembongkaran permukiman liar di kawasan kalijodo pada akhir bulan ini. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah seusai melaksanakan rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo."Persiapan sudah matang. Tanggal 29 Februari, eksekusi (penertiban kawasan Kalijodo)," kata Saefullah, di Balai Kota, Jumat (19/2/2016	Sret 1	Data di samping menunjukkan adanya leksikon penekanan.	Data di samping menunjukkan leksikon penekanan. Leksikon penekanan ditunjukkan dengan adanya kata "memastikan". Kata "memastikan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menetapkan atau menentukan. Jadi, kata "memastikan" berarti penekanan untuk menetapkan pembongkaran pemukiman liar di kawasan Kalijodo segera dilakukan pada akhir bulan ini. Oleh karena itu, penggunaan kata "memastikan" dalam kalimat tersebut dapat memberikan daya penekanan kepada

					masyarakat, sehingga masyarakat yang menempati pemukiman liar di Kalijodo segera meninggalkan tempat tersebut.
2.	Ahok, Kapolda Metro, Dan Pangdam Jaya Bahas Penertiban Kalijodo Hari Ini	Polda Metro Jaya bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Pangdam Jaya akan menggelar rapat koordinasi membahas penertiban lokasi prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara, senin ini. Ya (rapat koordinasi)," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mohammad Iqbal saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/2/2016). Iqbal mengatakan, rapat koordinasi pembahasan Kalijodo itu akan digelar di Markas Polda Metro Jaya.	Sret 2	Data di samping menunjukkan adanya leksikon upaya.	Data di samping menunjukkan leksion upaya. Leksikon upaya ditunjukkan dengan adanya kata "menggelar" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengatur atau mempertontonkan. Jadi kata "menggelar" berarti upaya mengatur rapat koordinasi tentang penertiban lokasi prostitusi Kalijodo di Jakarta Utara yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Pangdam Jaya. Adanya pro dan kontra mengenai penertiban kawasan Kalijodo sehingga diadakannya rapat untuk menentukan dilakukan atau

					tidak penertiban tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kata “menggelar” dalam kalimat tersebut dapat memberikan daya upaya kepada masyarakat, sehingga masyarakat menyadari bahwa sebelum pengambilan keputusan tentang pembongkaran kawasan Kalijodo sudah diadakan pertemuan untuk menentukan apakah kawasan Kalijodo dibongkar atau tidak.
3.	Beda antara Kalijodo dan Dolly Menurut Ahok	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa kawasan Kalijodo berbeda dari lokasi prostitusi Dolly di Surabaya. Sebab, kawasan Dolly menjadi lokasi prostitusi resmi. "Kami kasusnya beda. (Kalijodo) ini kan memang jalur hijau yang diperjualbelikan," kata	Sret 3	Data di samping menunjukkan adanya leksikon penekanan.	Data di samping menunjukkan leksikon penekanan. Leksikon penekanan ditunjukkan dengan adanya kata “berpuluh-puluh”. Kata “berpuluh-puluh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti beberapa puluh. Jadi kata “berpuluh-puluh” memberikan penekanan

		<p>Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016). “Anda enggak mungkin biarkan di depan hidung kamu, berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak gitu melanggar, gimana kita mau bereskan Waduk Peluit,” kata Basuki lagi.</p>		<p>bahwa pelanggaran tersebut sudah terjadi beberapa puluh tahun dan hanya dibiarkan saja sementara masih ada tugas lain yaitu membereskan Waduk Peluit. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan warga Jakarta membuat Basuki kesal. Bentuk dari kekesalan Basuki dengan menyebutkan berpuluh-puluh sehingga pelanggaran itu dianggapnya banyak seperti pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, pembangunan permukiman tanpa izin dan lain-lan. Oleh karena itu, penggunaan kata “berpuluh-puluh” dalam kalimat tersebut menunjukkan daya penekanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak melakukan pelanggaran lagi dan mematuhi peraturan undang-undangan yang</p>
--	--	---	--	---

					berlaku.
4.	Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo	Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru. Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru."Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).	Sret 4	Data di samping menunjukkan adanya leksikon upaya.	Data di samping menunjukkan leksikon upaya. Leksikon upaya ditunjukkan dengan adanya kata "menawarkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada seseorang. Jadi kata "menawarkan" berarti upaya untuk menunjukkan sebuah unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru kepada warga Kalijodo yang memiliki KTP DKI oleh Basuki. Oleh karena itu, penggunaan kata "menawarkan" dalam kalimat tersebut memberikan daya upaya kepada masyarakat, sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah masih peduli terhadap rakyatnya dengan memberikan tempat tinggal baru bagi masyarakat

					Kalijodo yang digusur.
5.	Penambahan RTH Tak Membongkar Wilayah Berpenghuni Harus	RTH yang merupakan kewajiban dari pengembang, misalnya, masih banyak. Yayasan menyebut totalnya bisa mencapai Rp 10 triliun. Itu berdasarkan dari surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang sudah diterbitkan sepanjang 1977-2016. Pengembang memiliki kewajiban menyediakan 20 persen lahan yang mereka bangun untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sebagai pengembang pun masih nakal dan belum membayar utang tersebut. Pemerintah wajib menagih janji itu. "Pembangunan di sebuah kota harus dilakukan secara adil. Warga yang mendiami tanah negara jangan dicap berdosa.	Sret 5	Data di samping menunjukkan adanya leksikon penekanan.	Data di samping menunjukkan leksikon penekanan. Leksikon penekanan ditunjukkan dengan adanya kata "wajib" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti harus dilakukan. Jadi kata "wajib" berarti penekanan untuk pemerintah agar meminta janji pengembang untuk melunasi hutang. Oleh karena itu, penggunaan kata "wajib" dalam kalimat tersebut dapat memberikan daya penekanan kepada pemerintah, sehingga pemerintah tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh pengembang yang belum membayar dana yang sudah dijanjikan.

		Pindahkanlah mereka secara manusiawi,” kata Yayasan.			
		Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan para wali kota di DKI untuk mengembalikan fungsi lahan. Lahan yang bersertifikat akan dibeli, sementara tanah negara yang diduduki akan diambil alih, sebagaimana lokasi lain yang telah dikosongkan selama ini, seperti Kalijodo dan pinggiran Waduk Pluit.	Sret 6	Data di samping menunjukkan adanya leksikon perintah.	Data di samping menunjukkan leksikon perintah. Leksikon perintah ditunjukkan dengan adanya kata “menginstruksikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memberi perintah atau arahan. Jadi kata “menginstruksikan” berarti perintah untuk memberi arahan tentang pengembalian fungsi lahan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada bawahannya. Minimnya ruang terbuka hijau di DKI Jakarta membuat pekerjaan Basuki lebih banyak lagi sehingga segera untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lahan yang dianggap sebagai tanah milik pemerintah akan

					digunakan sebagai ruang terbuka hijau dengan bantuan para wali kota di DKI Jakarta dan staff di bawahnya. Informasi tentang lahan mana saja yang milik pemerintah dari para wali kota maupun staff tersebut akan memudahkan pekejaan Basuki.
6.	Kalijodo, Lokalisasi, dan Jalur Kereta Api	Tradisi Tionghoa, Peh Cun, pula yang makin menyemarakkan kawasan itu menjadi kawasan perjodohan. Walau entah bagaimana dari kawasan yang oleh muda-mudi sekaligus dimanfaatkan untuk mencari jodoh, kawasan itu berubah fungsi menjadi kawasan cari jodoh dalam "hitungan jam". Akan tetapi, kita paham bahwa kini tidak ada satu kapal pun yang berlayar di Kali Angke. Jadi, dari mana para	Sret 7	Data di samping menunjukkan adanya leksikon upaya.	Data di samping menunjukkan leksikon upaya. Leksikon upaya ditunjukkan dengan adanya kata "menyemarakkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menjadikan ramai. . Jadi kata "menyemarakkan" berarti upaya untuk menjadikan ramai kawasan Kalijodo sebagai perjodohan oleh warga Tionghoa dan Peh Cun. Kawasan tersebut banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan baik muda maupun yang sudah tua

		<p>pelanggan Kalijodo? Dapat saja dari pusat-pusat aktivitas bisnis dari sekitar kawasan tersebut. Namun, setelah diamat-amati, ternyata Stasiun Angke berjarak tidak sampai satu kilometer dari Kalijodo.</p>			<p>terutama etnis Tionghoa. Oleh karena itu, penggunaan kata “menyemarakkan” dalam kalimat tersebut dapat memberikan daya upaya kepada masyarakat, sehingga masyarakat datang di kawasan Kalijodo yang dianggap sebagai kawasan pertemuan jodoh.</p>
7.	<p>Kampung Pulo, Kalijodo, dan Target Ahok Selanjutnya.</p>	<p>Tak sedikit penolakan serta kecaman yang disampaikan beberapa pihak kepada Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski penertiban berakhir ricuh, namun sekitar 920 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Cara yang ditempuh Basuki pun terbilang berbeda dengan gubernur sebelumnya, Joko Widodo. Tak ada komunikasi dan makan</p>	Sret 8	<p>Data di samping menunjukkan adanya leksikon penekanan.</p>	<p>Data di samping menunjukkan leksikon penekanan. Leksikon penekanan ditunjukkan dengan adanya kata “ancaman” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang akan terjadi. Jadi kata “ancaman” berarti penekanan untuk memberi pertanda pemecatan bagi anak buah Basuki yang tidak mau mengikuti instruksi yang</p>

		<p>siang seperti yang dilakukan Jokowi. Basuki lebih memilih menggunakan ancaman pemecatan bagi anak buahnya yang tak mau mengikuti instruksinya.</p>			<p>telah diberikan Basuki. Ancaman yang diberlakukan Basuki ada sebagian yang menerima dan menolak. Masyarakat yang menolak terhadap kepemimpinan Basuki tersebut mengenai kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan sebagai gubernur DKI Jakarta membuat polemik di lingkungan masyarakat khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, penggunaan kata “ancaman” dalam kalimat tersebut dapat memberikan daya penekanan kepada pegawai Basuki, sehingga pegawai Basuki melaksanakan perintah yang diberikan oleh Basuki.</p>
8.	<p>Lurah Usulkan Penghapusan RW 05 Kalijodo</p>	<p>Namun, RT 01, 03, 04, 05 dan 06 telah kosong setelah pengusuran sehingga hanya tersisa empat RT, yakni RT 02,</p>	Sret 9	<p>Data di samping menunjukkan adanya leksikon perintah.</p>	<p>Data di samping menunjukkan leksikon perintah. Leksikon perintah ditunjukkan dengan adanya kata “dihapus” dalam</p>

		<p>07, 08 dan 09. “Kalau hanya empat RT dalam satu RW terlalu sedikit. Untuk itu, karena saat ini lima RT tersebut sudah tidak ada warga, saya akan usulkan agar keberadaan RW 05 dihapus, “ujar Maskur, Rabu (2/3/2106). Untuk empat RT yang tersisa saat ini, akan diusulkan dimasukkan ke RW 03 dan 04 yang memang wilayahnya juga dekat dengan dua RW tersebut. “Untuk itu saat ini saya sedang mengusulkan untuk mengusulkan pada Wali Kota agar keberadaan RW 05 dihapus,” ujar dia.</p>		<p>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak terlihat atau terdapat lagi. Jadi kata “dihapus” berarti perintah untuk keberadaan RW 05 tidak terlihat lagi karena warga yang ada di RW tersebut hanya sedikit dan tidak memenuhi jumlah warga yang ada pada suatu RW. Penghapusan RW tersebut sudah disetujui oleh warga Kalijodo tanpa adanya kegaduhan atau kericuhan di kawasan Kalijodo. Oleh karena itu, penggunaan kata “dihapus” dalam kalimat tersebut dapat memberikan daya perintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.</p>
--	--	---	--	---

D.2 Tabel Pemandu Analisis Data Konteks Sosial pada Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas

D.2.1 Konteks Sosial Politik

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1.	Ahok Tertawa Dengar Ahmad Dhani Ke Kalijodo	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana musisi Ahmad Dhani mengunjungi kawasan Kalijodo, Senin (15/2/2016) ini. Basuki justru kembali menyinggung Nikita Mirzani yang lebih memilih dirinya ketimbang Ahmad Dhani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. "Enggak apa-apalah, Ahmad Dhani mah gampanglah. Yang penting Nikita dukung gue daripada dia, gitu aja. He-he-he, " kata Basuki tertawa, di Balai Kota, Senin pagi.	Kpol 1	Data di samping menunjukkan konteks sosial politik yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial politik demokrasi yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Adanya politik di Indonesia yang bersifat demokratis artinya pemimpin dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan Basuki bahwa artis terkenal yang bernama Nikita Mirzani lebih memilih dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dari pada lawan politiknya Ahmad Dhani yang gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Basuki menunjukkan bahwa lebih pantas dirinya sebagai Gubernur jika dibandingkan dengan Ahmad Dhani.

					Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Basuki juga memiliki maksud tertentu dengan membawa nama artis yang memiliki popularitas di masyarakat untuk memberikan daya tertentu sehingga masyarakat menilai bahwa Basuki memiliki nilai tambah dengan artis yang mendukungnya ketika itu. Nilai tersebut memberikan daya bahwa masyarakat akan mengikuti pilihan artis tersebut yang memilih Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta termasuk pada Pemilu 2017.
2.	Kampung Pulo, Kalijodo, dan Target Ahok Selanjutnya.	Seperti yang diucapkan oleh Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu. "Sudah lima gubernur, enggak ada yang jadi bongkar. Mereka juga jadi bodo amat, akhirnya bangun	Kpol 2	Data di samping menunjukkan konteks sosial politik yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial politik demokrasi yang berkaitan dengan dukungan terhadap Basuki untuk terus melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini ditunjukkan

		<p>rumah lagi. Baru Pak Ahok (Basuki) nih yang akhirnya berani membuat keputusan itu. Kata Bapak, 'bereskan'," ujar Bambang ketika itu.</p>			<p>dengan pernyataan seorang lurah kampung melayu yang mendukung dan menghargai usaha Basuki untuk membongkar kawasan Kalijodo karena pemerintah kota sebelumnya tidak berani untuk melakukan pembongkaran tersebut. Selain itu, adanya penolakan yang dilakukan warga Kalijodo terhadap penertiban yang dilakukan Basuki. Penolakan tersebut berupa orasi dan tetap mendiami kawasan yang akan digusur sampai 3 hari.</p> <p>Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bambang sebagai lurah mewakili rakyat mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Basuki untuk menyejahterakan khususnya rakyat Jakarta.</p>
		Tak sedikit penolakan serta kecaman yang	Kpol 3	Data di samping menunjukkan	Data di samping berisi konteks sosial politik kebijakan pemerintah yang

		<p>disampaikan beberapa pihak kepada Basuki dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski penertiban berakhir ricuh, namun sekitar 920 kepala keluarga (KK) telah direlokasi ke Rusun Jatinegara Barat. Cara yang ditempuh Basuki pun terbilang berbeda dengan gubernur sebelumnya, Joko Widodo. Tak ada komunikasi dan makan siang seperti yang dilakukan Jokowi. Basuki lebih memilih menggunakan ancaman pemecatan bagi anak buahnya yang tak mau mengikuti instruksinya.</p>	<p>konteks sosial politik yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.</p>	<p>berkaitan dengan keputusan Basuki yang harus dilaksanakan tidak hanya anak buahnya, melainkan masyarakat harus mengikuti aturan yang dibuatnya. Basuki memberikan sanksi berupa pemecatan jika anak buahnya tidak mengikuti apa yang sudah ia putuskan. Dia beranggapan bahwa keputusannya itu harus dipenuhi dan tidak memperdulikan penolakan dari masyarakat yang tidak setuju. Penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan Basuki selalu melakukan demo di kantor pemprov Jakarta dengan menggunakan berbagai atribut agar kebijakan itu tidak dilaksanakan. Sementara respon Basuki terhadap demo tersebut tidak ada.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Basuki</p>
--	--	--	---	--

					terkesan memaksa tanpa memperdulikan masyarakat yang menolak dan mengabaikannya begitu saja.
--	--	--	--	--	--

D.2.2 Konteks Sosial Ekonomi

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1.	Kapolda Bantah Pembangunan Lahan Parkir Ucapan Terima Kasih Ahok Terkait Kalijodo	<p>Tito mengatakan, pihaknya tidak bisa hanya mengandalkan anggaran dari Polri untuk merenovasi dan membangun infrastruktur.</p> <p>Mengingat, anggaran dari Polri sangat terbatas. Lapangan parkir ini dibangun di atas lahan seluas 30.526 meter persegi. Lapangan itu dibiayai melalui kewajiban pengembang reklamasi. Adapun pembangunan dilakukan oleh PT Jaladri</p>	Keko 1	Data di samping menunjukkan konteks sosial ekonomi yang melatarbelakangi munculnya kasus pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial ekonomi pemerintah yang berkaitan dengan adanya anggaran Polri yang sedikit sehingga membutuhkan dana tambahan untuk melakukan renovasi kantor Polri. Sebagaimana dilansir republika.co.id besar anggaran Polri mencapai 62 Triliun rupiah dan digunakan untuk kasus penyelidikan perkasus sebesar 36% dari besarnya anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki anggaran yang

		<p>Kartika Paksi (Agung Podomoro Group). Basuki Tjahaja Purnama menyebut anggaran lapangan parkir mencapai Rp 70 miliar. Pembangunan diperkirakan rampung dalam waktu satu tahun.</p>		<p>minim terutama untuk memenuhi kebutuhannya perlu adanya anggaran yang lebih karena kasus yang diselidiki juga tidak sedikit.</p> <p>Biaya untuk membangun infrastruktur di lingkungan Polri juga memerlukan dana yang tidak sedikit, yaitu sebesar Rp 70 miliar dalam pembagunan lapanga parkir. Adanya dana yang minim pembagunan lahan parkir Polri menggunakan dana dari pengembang reklamasi. Pengembang reklamasi dibekerja sama dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur umum dengan pembagian hasil sebesar 15% untuk pemerintah. Dana inilah yang digunakan untuk membangun lahan parkir Polri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembagunan lahan parkir</p>
--	--	---	--	--

					tidak bisa mengandalkan anggaran Polri melainkan kewajiban pihak pengembang.
2.	Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo	Sementara itu, bagi warga Kalijodo yang ingin berdagang, Pemprov DKI Jakarta berjanji akan memberikan modal. Syaratnya, warga mendaftarkan diri ke Bank DKI serta membayarkan retribusi tiap harinya. "Untuk (warga Kalijodo) yang mau dagang, kami kasih ke (dinas) UMKM atau PD Pasar Jaya," kata Basuki.	Keko 2	Data di samping menunjukkan konteks sosial ekonomi yang melatarbelakangi munculnya kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial ekonomi pemerintah yang berkaitan dengan pemberian modal terhadap masyarakat Kalijodo yang ingin membuka usaha berdagang. Pemberian modal tersebut memiliki syarat dimana masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai nasabah di Bank DKI untuk membayar modal yang dipinjam tersebut dengan pembayaran setiap harinya. Selain itu, masyarakat yang ingin berdagang akan diberdayakan di dinas perdagangan agar mendapat wawasan tentang usaha yang akan dilakukannya nanti. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh warga DKI yang rumahnya digusur

					dan mereka memilih untuk mencari pekerjaan sendiri yang pendapatannya sama dengan pekerjaan sebelumnya. Hal ini juga termasuk dalam penolakan dan bentuk protes warga terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah saat itu.
3.	Kebiasaan "Kerja Enak" di Kalijodo	"Daripada kerja di perusahaan, pergi pagi, pulang sore, jauh-jauh cuma dapat Rp 3,5 juta sebulan, enakan kerja di Kalijodo. Cuma jaga parkir tiap malam saja bisa dapat lebih banyak. " Demikian penggalan obrolan antara petugas posko relokasi warga Kalijodo dan warga yang bertanya soal pelatihan kerja yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu.	Keko 3	Data di samping menunjukkan konteks sosial ekonomi yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima masyarakat Kalijodo yang berkerja sebagai juru parkir di kawasan Kalijodo. Penghasilan yang didapatkan ketika menjadi juru parkir jauh lebih besar jika dibandingkan bekerja dikantor atau perusahaan. Gaji yang didapat sebagai pekerja kantor sebesar Rp 3,5 juta perbulan dengan waktu bekerja mulai pagi sampai sore. Jika bekerja sebagai juru parkir di

				<p>kawasan Kalijodo yang bekerja hanya malam saja dengan penghasilannya menyesuaikan dengan kendaraan yang diparkir, seperti motor tarifnya Rp 5000 permotor dan mobil tarifnya Rp 30.000 permobil. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kalijodo lebih memilih bekerja yang waktunya hanya sebentar tetapi memiliki penghasilan yang banyak dibandingkan bekerja dengan waktu yang lama tetapi berpenghasilan sedikit</p>
--	--	--	--	---

D.2.3 Konteks Sosial Hukum

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1.	Beda Antara Kalijodo dan Dolly Menurut Ahok	<p>Basuki menjelaskan, kawasan lokasi prostitusi Dolly merupakan sebuah perkampungan yang ditempati oleh para pekerja seks komersial (PSK). Meski Dolly sudah ditutup, kata Basuki, praktik prostitusi masih banyak terjadi.</p> <p>Sementara itu, Kalijodo merupakan ruang hijau yang dibangun bangunan liar, kemudian disalahgunakan untuk praktik prostitusi, perjudian, serta penjualan minuman keras.</p>	Khuk 1	Data di samping menunjukkan konteks sosial hukum yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial hukum tindak kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman keras. Kegiatan-kegiatan tersebut dilarang oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang pasal 296 KUHP, pasal 542 KUHP, dan Perda DKI Jakarta No. 74 tahun 2005. Salah satu bunyi pasal 296 KUHP “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima

					belas ribu rupiah.
2.	Sederet Kasus yang Membelit Daeng Azis	<p>Hari itu pula, Azis ditangkap tim Polres Metro Jakarta Utara. Namun, penangkapan Azis bukan terkait kasus prostitusi yang menjeratnya, melainkan kasus dugaan pencurian listrik. Dia diduga membuat sambungan listrik ilegal untuk kafe miliknya di Kalijodo, yakni Kafe Intan. Azis diduga menyambung hingga empat aliran listrik secara tidak resmi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, dugaan ini dibantah Razman. Menurut Razman, kliennya itu telah membayar Rp 17 juta kepada PLN untuk mengalirkan listrik ke kafanya.</p> <p>Kini, Kafe Intan dan bangunan lainnya di</p>	Khuk 2	Data di samping menunjukkan konteks sosial hukum yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial hukum tindak kejahatan yang berkaitan dengan kasus pencurian yang dilakukan preman Kalijodo, yaitu Daeng Aziz. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus hukum yang dilakukan oleh Aziz terhadap Negara yang dirugikan mengenai kasus pencurian listrik yang dilakukannya. Meskipun dulunya ia pernah ditangkap pihak berwajib dengan tuduhan prostitusi dan perdagangan manusia namun masih dibebaskan sedangkan dalam kasus pencurian listrik ia dikenai pasal 362 KUHP tentang barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

		<p>Kalijodo telah dirobohkan. Pada Senin (29/2/2016), Pemprov DKI Jakarta mengerahkan eskavator-eskavator untuk mengancurkan bangunan liar di sana. Kalijodo akan dikembalikan fungsinya menjadi ruang terbuka hijau setelah ini.</p>			<p>hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sembilan ratus rupiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian yang dilakukan harus menjalani proses hukum sesuai dengan putusan pengadilan karena tindakan tersebut merugikan negara.</p>
3.	<p>Ahok, Kapolda Metro, Dan Pangdam Jaya Bahas Penertiban Kalijodo Hari Ini</p>	<p>Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjanji akan menertibkan lokasi prostitusi Kalijodo karena termasuk kawasan hijau. Ahok menyebutkan akan menyediakan rumah susun (rusun) bagi warga Kalijodo yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian juga</p>	Khuk 3	<p>Data di samping menunjukkan konteks sosial hukum yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.</p>	<p>Data di samping berisi konteks sosial hukum kegiatan usaha yang berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai atas tanah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kafe-kafe yang tidak memiliki ijin di kawasan Kalijodo akan ditertibkan oleh pemerintah kota Jakarta sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUPA tentang</p>

		<p>menegaskan bahwa kepolisian akan mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan warga Kalijodo. Tito menuturkan, rapat koordinasi itu untuk membahas langkah yang akan diambil guna menertibkan kafe-kafe ilegal di Kalijodo.</p>		<p>hak guna bangunan sebagai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya surat ijin untuk mendirikan bangunan dan surat kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk kegiatan usaha sehingga tidak dianggap sebagai bangunan liar.</p>
--	--	--	--	---

D.2.4 Konteks Sosial Budaya

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1.	Ahok Tak Hadiri Rapat Koordinasi Penertiban Kalijodo	"Enggak, enggak... Saya enggak ketemu Kapolda hari ini," kata Basuki, di Balai Kota. Basuki mengatakan, Tito akan memimpin rapat koordinasi tersebut. Tito, kata dia, akan mendengarkan pandangan dari seluruh pihak terkait. "Kapolda akan dengarkan semuanya dari pihak RT/RW. Karena kasus ini berbeda dengan Dolly (kawasan lokalisasi di Surabaya)," kata Basuki. "Kemarin kami sudah ketemu sama Kapolda dan Pangdam Jaya, mereka akan atur. Mereka dengar masukan kami dan kalau sudah selesai, baru saya ketemu," kata Basuki. Hari ini, rapat koordinasi	Kbud 1	Data di samping menunjukkan konteks sosial budaya yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial budaya yang berkaitan dengan adanya musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kalijodo memiliki sosial yang tinggi, dimana masyarakat mau melakukan musyawarah yang diadakan oleh Tito sebagai pemimpin rapat koordinasi sebelum kawasan Kalijodo digusur. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai solusi bersama bagaimana menyikapi permasalahan pengusuran kawasan tersebut. Hal ini sudah menjadi warisan nenek moyang sejak Indonesia belum merdeka dengan adanya kebijakan-kebijakan yang akan diambil selalu dimusyawarahkan terlebih

		dilaksanakan di Mapolda Metro Jaya. Hingga pukul 11.00, baru Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi yang sudah hadir.			dulu agar bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun. Kegiatan tersebut sudah melekat pada masyarakat Indonesia hingga sekarang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah dengan bersama-sama secara terbuka.
2.	Kalijodo, Lokalisasi, dan Jalur Kereta Api	Bagaimana dengan di Jakarta? Warga Ibu Kota ternyata juga mengenal kawasan lokalisasi yang terkoneksi dengan jalur kereta api. Adalah kawasan Bongkaran yang seolah menjadi lokalisasi yang "terintegrasi" dengan Stasiun Tanah Abang. Lokasi pelacuran lain di Jakarta yang juga nyaris menempel	Kbud 2	Data di samping menunjukkan konteks sosial budaya yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi konteks sosial budaya yang berkaitan dengan lokasi prostitusi selalu di dekat jalur kereta api. Kebutuhan batin para pekerja kereta api yang tidak dipenuhi oleh istri mereka mengakibatkan para pekerja tersebut mencari wanita pekerja seks komersial. Keadaan yang jauh dari istri inilah yang menyebabkan para pekerja kereta api melakukan

		<p>dengan stasiun adalah Planet Senen yang kini tinggal cerita.</p>			<p>prostitusi. Selain itu, wanita PSK tidak hanya dari wilayah dekat jalur kereta itu sendiri tetapi berasal dari luar kota karena kereta api merupakan transportasi yang murah dan mudah dijangkau. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan prostitusi tidak akan hilang karena kereta api difungsikan sebagai alat transportasi yang murah dan untuk memenuhi kebutuhan batin para pekerja kereta api yang jauh dar istrinya sehingga para pelacur yang datang tidak hanya dari Jakarta saja melainkan dari luar kota tersebut.</p>
		<p>Tradisi Tionghoa, Peh Cun, pula yang makin menyemarakkan kawasan itu menjadi kawasan perjodohan. Walau entah bagaimana</p>	Kbud 3	<p>Data di samping menunjukkan konteks sosial budaya yang melatarbelakangi munculnya</p>	<p>Data di samping berisi konteks sosial budaya yang berkaitan dengan tradisi Tionghoa yang menjadikan kawasan Kalijodo sebagai kawasan perjodohan. Sejarah tentang</p>

		<p>dari kawasan yang oleh muda-mudi sekaligus dimanfaatkan untuk mencari jodoh, kawasan itu berubah fungsi menjadi kawasan cari jodoh dalam "hitungan jam". Akan tetapi, kita paham bahwa kini tidak ada satu kapal pun yang berlayar di Kali Angke. Jadi, dari mana para pelanggan Kalijodo? Dapat saja dari pusat-pusat aktivitas bisnis dari sekitar kawasan tersebut. Namun, setelah diamat-amati, ternyata Stasiun Angke berjarak tidak sampai satu kilometer dari Kalijodo.</p>		<p>pemberitaan kasus Kalijodo.</p>	<p>kawasan Kalijodo dulunya sebagai sentral ekonomi Jakarta dan tempat pelarian orang Tionghoa yang melarikan diri dari Mancuria. Ketika mereka melarikan diri mereka tidak membawa istri sehingga adanya pencarian jodoh di kawasan Kalijodo sampai saat ini. Pada masa VOC inilah penduduk mayoritas di kawasan Kalijodo adalah etnis Tionghoa. Namun, saat ini kawasan Kalijodo digunakan sebagai pencarian jodoh dalam hitungan jam saja tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal tersebut merupakan penyimpangan budaya yang awalnya sebagai pencarian jodoh untuk dijadikan istri sekarang hanya prostitusi.</p> <p>Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan Kaijodo sudah sejak zaman Indonesia</p>
--	--	---	--	------------------------------------	--

					masih dikuasai oleh Belanda menjadi kawasan perjodohan untuk mencari istri tetapi sekarang hanya untuk memenuhi kepuasan batin sementara saja.
--	--	--	--	--	--

D.3 Tabel Pemandu Analisis Data Ideologi pada Pemberitaan Kasus Kalijodo Di Laman Kompas

D.3.1 Ideologi Pancasila

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1.	Beda Antara Kalijodo dan Dolly Menurut Ahok	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa kawasan Kalijodo berbeda dari lokasi prostitusi Dolly di Surabaya. Sebab, kawasan Dolly menjadi lokasi prostitusi resmi. "Kami kasusnya beda. (Kalijodo) ini kan memang jalur hijau yang diperjualbelikan," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016). "Anda enggak mungkin biarkan di depan	Idep 1	Data di samping menunjukkan ideologi Pancasila yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi ideologi Pancasila yang berkaitan dengan adanya pelanggaran yang hanya dibiarkan saja tanpa ada tindakan untuk menyelesaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran harus ditindak dengan tegas agar peraturan yang ada bisa ditegakkan dan ditaati oleh masyarakat. Selain itu, peraturan tersebut terdapat pada sila Pancasila yang ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada butir ke-27 tentang menjaga

		<p>hidung kamu, berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak gitu melanggar, gimana kita mau bereskan Waduk Peluit,” kata Basuki lagi.</p>			<p>keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan harus ditegakkan dan itu berlaku tidak hanya kepada golongan tertentu.</p>
2.	<p>Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo</p>	<p>Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan sejumlah solusi bagi warga Kalijodo terkait rencana ditiarkannya wilayah tersebut. Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru."Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).</p>	Idep 2	<p>Data di samping menunjukkan ideologi Pancasila yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.</p>	<p>Data di samping menunjukkan adanya ideologi Pancasila yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo adalah solusi yang diberikan Basuki untuk menyelesaikan masalah penggusuran Kalijodo. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menanamkan rasa kekeluargaan dengan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait penggusuran Kalijodo yang termuat dalam sila Pancasila yang ke-4, yaitu sila kerakyatan yang</p>

					dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan pada butir ke-20 tentang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya keinginan untuk memecahkan masalah pembongkaran Kalijodo dengan tidak memihak siapa pun.
3.	Masjid Terakhir di Kalijodo Akhirnya Dibongkar	Sebelum masjid Al Mubarrokah dibongkar, petugas menurunkan kubah masjid itu. Sebuah alat berat kemudian dikerahkan dan masjid itu pun akhirnya rata dengan tanah. Wali Kota Jakarta Barat, Anas Efendi, menyaksikan pembongkaran itu. Anas mengatakan sebelum pembongkaran pihaknya sudah melakukan	Idep 3	Data di samping menunjukkan ideologi Pancasila yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi ideologi Pancasila yang berkaitan dengan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memegang teguh warisan dari leluhur dengan menghargai perbedaan agama antara sesama, terlihat dari cara masyarakat memandang permasalahan penggusuran masjid yang akan dilakukan dengan

		pembicaraan dengan pengurus masjid.		<p>menurunkan kubah masjid tersebut sebelum dibongkar dan dibangun kembali di kawasan Kalijodo tetapi dengan bangunan baru serta tempat yang disesuaikan oleh pemerintah kota. Sila Pancasila yang ke-1 mencerminkan kegiatan tersebut, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa pada butir ke-2 tentang hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat toleransi dalam umat beragama. Toleransi itu terlihat dari perilaku masyarakat terhadap pemeluk agama Islam yang tempat ibadahnya akan dibongkar dan dibangun kembali dengan desain yang sudah ditentukan</p>
--	--	-------------------------------------	--	---

					pemerintah. Penurunan kubah masjid inilah yang dianggap sebagai bentuk dari perilaku toleransi karena kubah merupakan lambang dari ALLAH sebagai wujud kepercayaan yang diajarkan dalam agama Islam.
--	--	--	--	--	--

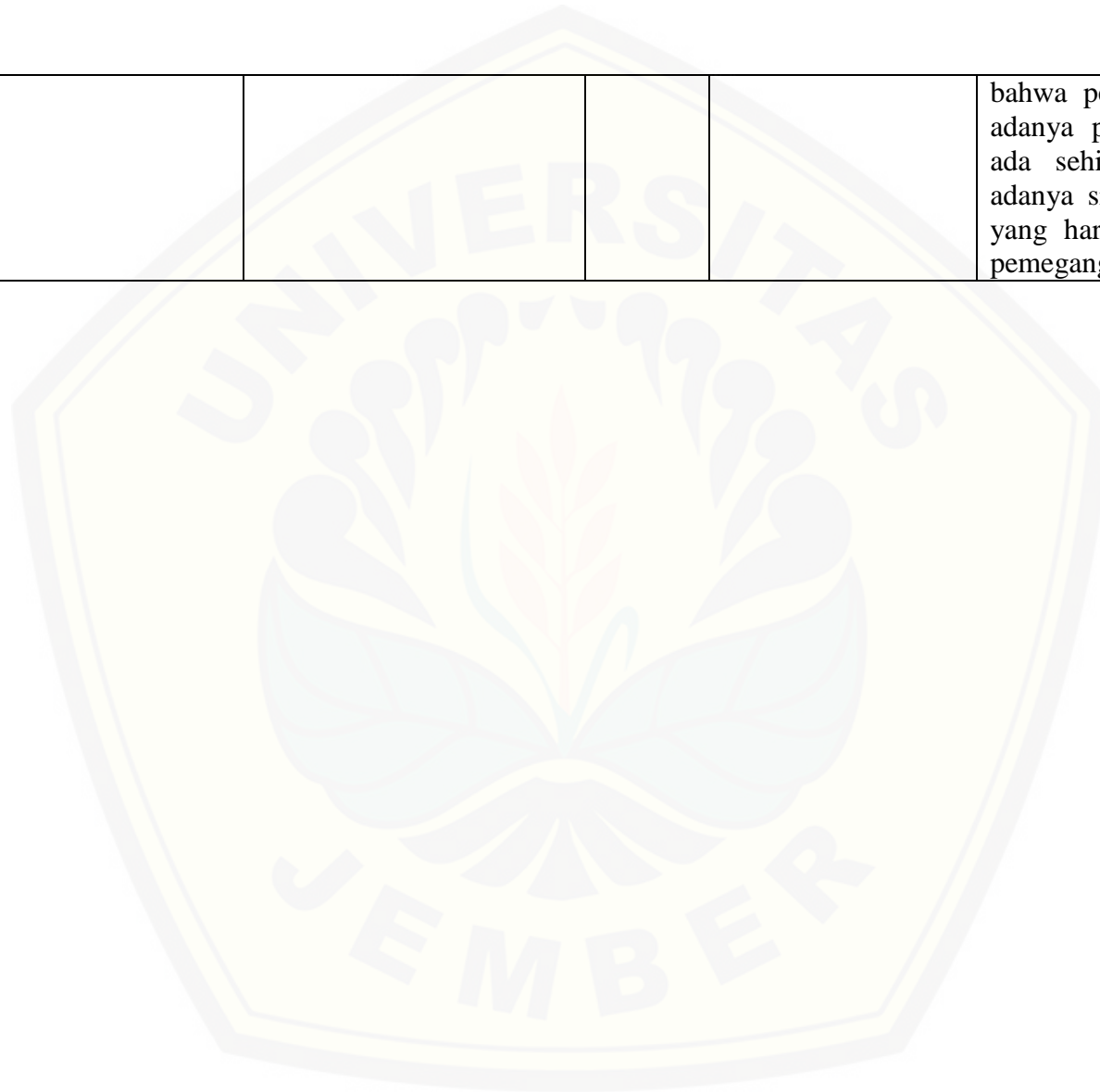
D.3.2 Ideologi Politik

No.	Judul Berita Di Laman Kompas	Data	Kode	Analisis dan Interpretasi	Hasil Analisis
1.	Ahok Tertawa Dengar Ahmad Dhani Ke Kalijodo	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tertawa mendengar rencana musisi Ahmad Dhani mengunjungi kawasan Kalijodo, Senin (15/2/2016) ini. Basuki justru kembali menyinggung Nikita Mirzani yang lebih memilih dirinya ketimbang Ahmad Dhani dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. "Enggak apa-apalah, Ahmad	Idepol 1	Data di samping menunjukkan ideologi politik yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi ideologi politik yang berkaitan dengan pernyataan Basuki yang memberikan opini kepada masyarakat bahwa dirinyalah yang pantas menjadi Gubernur. Basuki memandang bahwa masyarakat Jakarta sudah mengetahui gaya kepemimpinannya sehingga dia merasa percaya diri dan yakin akan terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017. Menurut

		<p>Dhani mah gampanglah. Yang penting Nikita dukung gue daripada dia, gitu aja. He-he-he," kata Basuki tertawa, di Balai Kota, Senin pagi.</p>		<p>Basuki hal tersebut ditunjukkan dengan adanya artis terkenal yang memilih dia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Basuki didalam pernyataannya memberikan ideologi politik untuk diterima oleh masyarakat yang nantinya jika ia mencalonkan kembali sebagai calon Gubernur DKI Jakarta maka masyarakat akan tetap memilihnya hingga tujuannya tersebut tercapai. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Basuki agar masyarakat mau mengikuti pemahaman yang ditanamkan secara tidak langsung. Ketika pemahaman tersebut sudah ditanamkan dan diterima oleh masyarakat maka secara tidak sadar pula masyarakat tersebut mengikut saran-saran yang</p>
--	--	---	--	--

					diberikan Basuki untuk mencapai tujuannya.
2.	Ini Solusi Ahok untuk Warga Kalijodo	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawarkan sejumlah solusi bagi warga Kalijodo terkait rencana ditertibkannya wilayah tersebut. Bagi warga yang memiliki KTP DKI, Basuki menawarkan unit rumah susun sebagai tempat tinggal baru."Kalau ada yang mau tinggal, kami bagi ke rusun yang ada. Ada rusun yang kosong, kami bagi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (15/2/2016).	Idepol 2	Data di samping menunjukkan ideologi politik yang melatarbelakangi munculnya pemberitaan kasus Kalijodo.	Data di samping berisi ideologi politik yang berkaitan dengan solusi yang diberikan Basuki terhadap masyarakat Kalijodo. Hal ini menunjukkan bahwa maksud dari pemeberian solusi agar masyarakat tersebut mau menerima segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dan kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat dengan lapang dada. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalijodo dapat juga dianggap sebagai permasalahan politik karena di dalamnya terdapat pemegang kekuasaan yang sedang menjalankan perilaku politiknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan

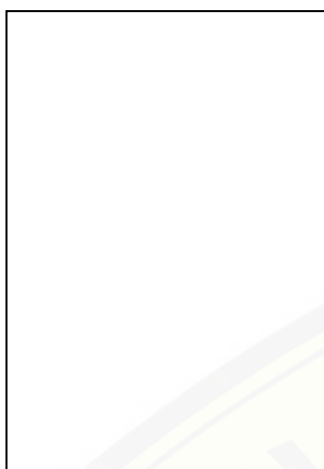
					bahwa perilaku disebabkan adanya permasalahan yang ada sehingga menentukan adanya sikap atau tindakan yang harus dilakukan oleh pemegang kekuasaan.
--	--	--	--	--	---



E. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat Kalijodo sebelum dan sesudah penertiban dilakukan oleh Pemerintah DKI?
2. Bagaimana kondisi lingkungan kawasan Kalijodo sebelum dan sesudah penertiban?
3. Berasal dari suku mana saja masyarakat Kalijodo?
4. Bahasa apa yang digunakan masyarakat Kalijodo untuk berkomunikasi satu sama lain?
5. Bagaimana model pakian yang digunakan masyarakat Kalijodo?
6. Apa mata pencaharian masyarakat Kalijodo sebelum dan sesudah penertiban?
7. Bagaimana sikap masyarakat Kalijodo ketika tempat tinggalnya ditertibkan?
8. Mengapa kawasan Kalijodo ditertibkan?
9. Siapa saja yang terlibat dalam penertiban kawasan Kalijodo?

AUTOBIOGRAFI



Penulis bernama lengkap Tiara Nurmarinda dan lahir di Jember pada tanggal 31 Juli 1994. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dan terlahir dari pasangan Bapak Nurhadi dan Ibu Emi. Saat ini, penulis tinggal di desa Kraton kecamatan Kencong RT 04 RW 06. Penulis memiliki hobi menyanyi dan olahraga serta bercita-cita menjadi seorang guru. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita selama dua tahun dan lulus pada tahun 2000, kemudian penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Kraton 2 selama enam tahun dan lulus pada tahun 2006. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 2 Jombang selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Kencong dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.